STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DESA SUNGAI LANGSAT)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh:

LATHIFATUS SA'ADAH
NPM. 220411036

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 8
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
Dr. DESRIADI, S.Sos,M.Si	**SARJAN M. S.Sos.,M.Si**
NIDN. 1022018302	**NIDN. 1008128002**

1	**RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si**	**(Pembimbing 1)**	( )
2	**EMILIA EMHARIS,S.Sos.,M.Si**	**(Anggota)**	( )
3	**SAHRI MUHARAM,S.Sos.,M.Si**	**(Anggota)**	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DEKSARJAN M, S.Sos,M.Si
NIDN. 100128002

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DESA SUNGAI LANGSAT)
NAMA	: LATHIFATUS SA'ADAH
NPM	: 220411036
UNIVERSITAS	: ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	: ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si	**SARJAN M, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1030058402	**NIDN. 1008128002**

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 100510890

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : LATHIFATUS SA'ADAH

NPM : 220411036

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencamtumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari dapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 28 Agustus 2026



LATHIFATUS SA'ADAH
NPM. 220411036

MOTTO

"Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna"

(QS.An-Najm:39-41)

"Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan"

(sutan sjahrir)

"Min ajli walidayya, wa liwalidayya, wa biwalidayya"

"dari orang tuaku,demi orang tuaku,dan untuk orang tuaku"

(Lathifatus Sa'adah)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan kepada Allah SWT yang selalu membersamai setiap langkah saya untujk menyeledsaikan tugas alhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya, semoga ini menjadi langkah awal untuk kesuksesan masa depan saya.

Untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Siti Maimunah dan Ayahanda Muhammad Farhan, terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, atas kepercayaan yang tidak pernah goyah, dan atas kasih sayang yang selalu menjadi tempat saya kembali. Bagi saya, kalian bukan hanya orang tua, tetapi alasan terbesar saya untuk terus melangkah. Setiap proses yang saya lalui, tidak pernah lepas dari harapan yang kalian titipkan dalam diam. Karya ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih saya, untuk segala hal besar yang telah kalian berikan tanpa pernah meminta kembali.

Untuk sahabat saya selama perjalanan kuliah, terima kasih telah hadir dan tetap tinggal di setiap fase, menemani tanpa harus selalu diminta, dan menguatkan tanpa banyak kata.

Untuk teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini, Afdelia Salina Rusdi terima kasih telah berjalan bersama dalam proses yang tidak selalu mudah, saling mengingatkan untuk tetap bertahan, hingga akhirnya kita sampai di titik ini. Dan untuk diri saya sendiri, Lathifatus Sa’adah, terima kasih karena telah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Saya memilih untuk tetap melangkah, tanpa terhenti oleh hal-hal yang tidak lagi sejalan. Saya belajar untuk bersikap tegas terhadap diri sendiri, menempatkan prioritas dengan lebih jelas, dan tidak kehilangan arah hanya karena perubahan yang datang. Apa yang telah berlalu saya terima sebagai bagian dari proses, bukan untuk disesali, tetapi untuk memperkuat langkah ke depan. Di fase ini, saya berdiri dengan kesadaran penuh atas pilihan saya, menjalani semuanya dengan fokus, dan tidak menggantungkan tujuan pada siapa pun. Saya percaya, kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk tetap utuh, berdiri sendiri, dan melangkah tanpa ragu. Karya ini adalah pengingat, bahwa apa yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sungai Langsat)" dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan dalam kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menuntut ilmu serta memperjuangkan kebenaran.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Proses penyusunan skripsi ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti perjuangan, ketekunan, dan doa. Setiap kesulitan yang datang telah mengajarkan penulis bahwa keberhasilan tidak pernah lahir dari kemudahan, melainkan dari keuletan untuk tetap bertahan meski dihadapkan pada keterbatasan dan ujian.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap akhir ini.
2. **Bapak Sarjan M,S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial sekaligus Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan, perhatian, dan motivasi serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses akademik dan bimbingan berlangsung.
3. **Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara, yang telah memberikan bimbingan serta dorongan moral bagi penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. **Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si,** selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, saran, dan kritik membangun dalam penyempurnaan karya ini.

5. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial UNIKS**, atas ilmu, dedikasi, dan pelayanan terbaik yang diberikan selama penulis menempuh studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan menjadi bukti kecil dari kerja keras, doa, serta pengabdian terhadap ilmu pengetahuan.

Teluk Kuantan, 20 Agustus 2026

LATHIFATUS SA'ADAH
NPM. 220411036

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
KATA PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
ABSTRACT ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**
2.1 Kajian Pustaka 8
2.1.1 Teori Administrasi Negara 8
2.1.2 Teori Manajemen Strategis 10
2.1.3 Teori Mitigasi Bencana 13
2.1.4 Teori Partisipasi Masyarakat 16
2.1.5 Teori Manajemen Bencana 19
2.1.6 Teori Kebijakan Publik 24
2.1.7 Penelitian Terdahulu 27
2.2 Kerangka Pemikiran 31
2.2.1 Unsur-Unsur penting Dalam Kerangka Berpikir 35
2.3 Hipotase Kerja 40

2.4 Definisi Operasional 40
2.5 Operasional Variabel 42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
3.1. Jenis Penelitian 43
3.2. Informan 44
3.3. Sumber Data 45
3.3.1 Data Primer 45
3.3.2 Data Skunder 46
3.4. Fokus Penelitian 47
3.5. Lokasi Penelitian 48
3.6. Metode Pengumpulan Data 49
3.6.1 Wawancara 49
3.6.2 Obserevasi 49
3.6.3 Dokumentasi 50
3.7. Metode Analisis Data 50
3.7.1 Reduksi Data 50
3.7.2 Penyajian Data 51
3.7.3 Penarikan Kesimpulan 51
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian 52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 53
4.1 Tinjauan Sejarah Desa Sungai Langsat 53
4.2 Kondisi Geografis 55
4.3 Kondisi Demografis 58
4.4 Kondisi Sosial Ekonomi 60
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 62
4.6 Jumlah Penduduk 64
4.7 Rumah Ibadah Desa Sungai Langsat 68
4.8 Fasilitas Umum Desa Sungai Langsat 72
4.8.1 Fasilitas Pemerintahan 73
4.8.2 Fasilitas Pendidikan 74
4.8.3 Fasilitas Kesehatan 74

4.8.4 Fasilitas Olahraga Desa Sungai Langsat 75
4.8.5 Infrastruktur Desa 76
4.8.6 Sarana Ekonomi Masyarakat 77
BAB V HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN..... 78
5.1 Identitas Responden..... 78
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin 78
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 79
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur..... 79
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat). 80
5.2.1 Indikator Perencanaan Penanggulangan Banjir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat) 80
5.2.2 Indikator Pelaksanaan Tindakan dalam Penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat)..... 86
5.2.3 Indikator Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat)..... 91
5.2.4 Indikator Kolaborasi Dan Partisipasi Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat)96
5.2.5 Hambatan dan Solusi dalam penanggulangan Banjir Di Kabupaten Kuantan Singingi (studi Kasus Desa Sungai Langsat)..... 101
5.2.5.1 Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa Sungai Langsat, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Sungai Langsat, untuk mengetahui Hambatan penanganan banjir..... 101

5.2.5.2 Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak BPBD Kuansing, Kepala Desa Sungai Langsat, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Sungai Langsat, untuk mengetahui Solusi penanganan banjir. 106

5.3 Pembahasan penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulanan Bencana Banjir Di Kabupaten Kuantan singingi (Studi Kasus Di Desa Sungai Langsat) 112

BAB VI PENUTUP 116

6.1 Kesimpulan 116

6.2 Saran116

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN 120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 27
Tabel 2.2 Operasional Variabel..... 42
Tabel 3.1 Informan Penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Desa Sungai Langsat) 45
Tabel 3.2 Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi(Studi Kasus di Desa Sungai Langsat) . 52
Tabel 4.1 Jumlah Rumah Ibadah Desa Sungai Langsat..... 71
Tabel 4.2 Fasilitas Pemerintahan Desa Sungai Langsat 72
Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan Desa Sungai Langsat..... 74
Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan Desa Sungai Langsat..... 75
Tabel 4.5 Fasilitas Olahraga Desa Sungai Langsat..... 75
Tabel 4.6 Infrastruktur Desa Sungai Langsat..... 76
Tabel 4.7 Sarana Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Langsat..... 77
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 78
Tabel 5.2. Identitas RespondenBerdasarkan Tingkat Pendidikan..... 79
Table 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran tentang strategi pemerintah dalam Penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi 32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
4. Surat Permohonan Riset
5. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi
6. Surat Keterangan
7. Surat balasan permohonan wawancara
8. Catatan Bimbingan Proposal Skripsi
9. Catatan Bimbingan Skripsi
10. Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat)

LATHIFATUS SA'ADAH
NPM. 220411036

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berjumlah 5 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulanan Bencana Banjir Di Kabupaten Kuantan singingi (Studi Kasus Di Desa Sungai Langsat) sudah cukup efektif, yang mana strategi pemerintah sudah cukup efektif ditengah keterbatasan / efisiensi anggaran untuk penanggulangan bencana, tentu tidak bisa hanya desa saja, perlu kerja sama antar banyak pihak, karena pemerintahan desa sangat terbatas dalam segi anggaran, fasilitas maupun tenaga kerja untuk penanggulangan banjir ini, untuk itu pihak kecamatan dan kabupaten melakukan mediasi berkoordinasi pihak perusahaan untuk penanggulangan banjir ini, sehingga dihasilkan kesepakatan bersama antara perusahaan yang beroperasi dan melintasi ruas jalan ini. yang mana pada waktu itu Kesepakatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuansing H Muklisin yang dihadiri oleh para perwakilan perusahaan dan badan usaha yang melintasi ruas yang sering terkena banjir

Kata Kunci : Strategi Pemerintah daerah dalam Penanggulangan Banjir

ABSTRACT

Local Government Strategy in Flood Disaster Management in Kuantan Singingi Regency (Case Study of Sungai Langsat Village)

LATHIFATUS SA'ADAH
NPM. 220411036

This research was conducted in Sungai Langsat Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to determine the strategy of the local government in flood disaster management. The formulation of the problem in this research is how the Kuantan Singingi Regency government's strategy in flood management in Sungai Langsat Village. The sampling technique used the Purposive Sampling method is a sampling technique with certain considerations totaling 5 people. The data analysis used is qualitative descriptive, through interviews then data reduction, data presentation and then the author draws conclusions. The results of this study can conclude that the Regional Government Strategy in Flood Disaster Management in Kuantan singingi Regency (Case Study in Sungai Langsat Village) has been quite effective, where the government's strategy has been quite effective amidst budget limitations / efficiency for disaster management, of course it cannot only be the village alone, it needs cooperation between many parties, because the village government is very limited in terms of budget, facilities and manpower for this flood management, for that reason the sub-district and district carried out mediation and coordination with the company for this flood management, so that a joint agreement was reached between the companies operating and crossing this road section. which at that time the Agreement was led directly by the Deputy Regent of Kuansing H Muklisin which was attended by representatives of companies and business entities that crossed the sections that were often affected by flooding.

Keywords : Local Government Strategy in Flood Management

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia, dan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk wilayahyang berada pada tingkat kerentanan tinggi. Secara geografis, Kabupaten KuantanSingingi dilalui Sungai Teso yang berindukkan di Kecamatan Singingi dan memiliki peranan besar dalam aktivitas sosial-ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sumber risiko banjir yang signifikan. Desa Sungai Langsat merupakan salah satu desa yang mengalami dampak paling serius dari peristiwa banjir berulang, dengan kejadian yang hampir terjadi setiap tahun. Intensitas banjir yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang dari fenomena musiman menjadi masalah kronis yang membutuhkan penanganan lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulanganyang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif melalui perencanaan berbasis risiko, penguatan sistem peringatan dini, serta integrasi kebijakan lintas sektor yang mampu mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan dan iklim.

Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Sungai Langsat mengalami perubahan kondisi hidrologi akibat sedimentasi yang semakin tinggi pada Sungai Kuantan, berkurangnya vegetasi penahan air di daerah hulu, dan meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Aktivitas seperti pembukaan lahan baru, ekspansi kebun sawit, dan tidak optimalnya pengawasan tata ruang menyebabkan

berkurangnya daya serap tanah serta meningkatnya limpasan permukaan. Kondisi ini menuntut adanya strategi rehabilitasi lingkungan yang terintegrasi, seperti reboisasi daerah hulu, pengendalian tata guna lahan berbasis daya dukung lingkungan, serta penegakan regulasi terhadap aktivitas yang merusak ekosistem. Selain itu, normalisasi sungai dan pengendalian sedimentasi melalui pengerukan berkala menjadi langkah teknis yang perlu diprioritaskan guna mengembalikan kapasitas tampung sungai dan mengurangi potensi luapan air.

Kerusakan lahan pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat menjadi persoalan yang sangat strategis. Setiap banjir besar menghasilkan endapan lumpur yang merusak tanaman, menurunkan produktivitas lahan, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga petani. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian, pengembangan pertanian tahan banjir, serta pemberian bantuan pascabencana yang tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya program asuransi pertanian dan pelatihan adaptasi bagi petani agar mampu menghadapi risiko banjir secara lebih resilien. Dari sisi kesehatan, strategi peningkatan akses air bersih, sanitasi darurat, dan layanan kesehatan berbasis komunitas menjadi penting untuk mengurangi risiko penyakit pascabanjir.

Dari aspek kelembagaan, penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki dasar hukum melalui sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh mulai

dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Dalam konteks strategi, implementasi regulasi ini perlu diperkuat melalui penyusunan rencana kontinjensi yang operasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi kebijakan desa tangguh bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 juga harus dioptimalkan melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang efektif, sehingga setiap instansi memiliki peran yang jelas dalam siklus penanggulangan bencana.

Namun, regulasi yang telah dibentuk belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi yang perlu dikembangkan adalah penguatan skema pembiayaan berbasis risiko, seperti pengalokasian dana desa untuk mitigasi bencana, kemitraan dengan sektor swasta, serta pemanfaatan dana CSR untuk kegiatan pengurangan risiko banjir. Selain itu, peningkatan kapasitas BPBD melalui pelatihan teknis, penyediaan peralatan, serta digitalisasi sistem informasi kebencanaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas respons. Koordinasi antarinstansi juga perlu diperbaiki melalui sistem komunikasi terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain kendala kelembagaan, persoalan ekologis dan perubahan tata ruang menjadi aspek penting yang memperkuat urgensi penelitian ini. Strategi penataan ruang berbasis risiko menjadi sangat penting untuk mengendalikan pembangunan di kawasan rawan banjir. Pemerintah perlu menetapkan zonasi wilayah rawan,

melarang pembangunan di daerah sempadan sungai, serta mendorong pembangunan infrastruktur hijau seperti ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas penambangan material sungai harus diperketat untuk mengurangi sedimentasi. Infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, drainase, dan kolam retensi juga perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar mampu menahan debit air yang besar.

Dalam konteks manajemen risiko bencana, penanggulangan banjir harus melihat tiga dimensi penting yaitu hazard, vulnerability, dan capacity. Strategi yang efektif harus mampu menekan tingkat bahaya melalui intervensi teknis, mengurangi kerentanan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan. Di Desa Sungai Langsat, integrasi ketiga aspek ini dapat dilakukan melalui penyusunan peta risiko partisipatif, pembentukan kelompok siaga bencana, serta pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala. Pendekatan ini akan menciptakan sistem penanggulangan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi tantangan besar dalam merumuskan strategi yang mampu mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Strategi jangka pendek seperti peningkatan sistem peringatan dini berbasis teknologi, normalisasi sungai, dan rehabilitasi infrastruktur harus segera dilakukan. Sementara itu, strategi jangka panjang meliputi rehabilitasi daerah tangkapan air, edukasi lingkungan, serta penguatan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan struktural dan nonstruktural menjadi

kunci dalam menciptakan sistem mitigasi yang efektif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Pendekatan partisipatif menjadi kunci karena masyarakat Desa Sungai Langsat memiliki pengetahuan lokal terkait pola banjir, titik rawan, dan mekanisme adaptasi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui program pemberdayaan, pelatihan kebencanaan, serta pembentukan relawan desa tangguh bencana. Pendekatan *Participatory Governance* akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin dan lebih efektif dalam implementasinya.

Dengan mempertimbangkan seluruh persoalan yang telah diuraikan, penelitian terkait strategi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting, tetapi juga merumuskan strategi yang aplikatif dan berbasis kebutuhan lokal. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mencakup aspek kebijakan, teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi kan masalah: “Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat, meliputi kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional yang diterapkan untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, serta memperkuat ketahanan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas strategi tersebut, termasuk peran partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana aspek lingkungan dan keberlanjutan ekologis diintegrasikan dalam strategi pemerintah, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan banjir yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di Desa Sungai Langsat.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen bencana, kebijakan publik, dan mitigasi risiko hidrometeorologi. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang *teori Flood Rzisk Management, Flood Resilience / Adaptive Management, Participatory Governance, dan Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction,* serta bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks nyata penanggulangan banjir di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya mengenai strategi

pemerintah dalam menghadapi bencana alam, integrasi partisipasi masyarakat, dan pendekatan berkelanjutan dalam mitigasi risiko bencana.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun dan memperbaiki strategi penanggulangan banjir, mulai dari aspek kebijakan, program, koordinasi antarinstansi, hingga partisipasi masyarakat. Hasil penelitian juga dapat menjadi pedoman bagi BPBD, pemerintah desa, dan lembaga terkait dalam merancang program mitigasi dan tanggap darurat yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat Desa Sungai Langsat dalam menghadapi risiko banjir, serta memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah rawan bencana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi Negara merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola urusan publik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara efektif, efisien, serta akuntabel (Bovaird & Löffler, 2020:45; Denhardt & Denhardt, 2020:33; Dunn, 2020:33; Birkland, 2020:27). Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan publik, tuntutan terhadap transparansi, responsivitas, kolaborasi, dan adaptabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga semakin tinggi (Head, 2021; Bovaird & Löffler, 2020:56; Jilke et al., 2022; UNDP, 2023).

Dalam perkembangannya lima tahun terakhir, teori Administrasi Negara banyak berfokus pada *governance*, *public innovation*, kolaborasi lintas aktor, digitalisasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu pendekatan yang paling dominan adalah *Public Governance*, yang memandang pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor, tetapi bagian dari jejaring kolaboratif yang melibatkan sektor privat, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional (Osborne, 2020; Head, 2021; Crosby et al., 2022; Bovaird & Löffler, 2020:71). Paradigma pemerintahan bergerak menuju *New Public Governance (NPG)* yang menekankan interaksi, koordinasi, dan kemitraan dalam penyelesaian masalah publik (Osborne, 2020:73). Pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan katalis penciptaan nilai publik. Selanjutnya, inovasi sektor publik (*public sector*

innovation) menjadi fokus penting dalam literatur terbaru. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, memperbaiki kualitas layanan, dan mempercepat respons pemerintah terhadap dinamika masyarakat (Bryson, 2018:11; Head, 2021; Bryson, 2018:25). Inovasi tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pada proses pelayanan, mekanisme kelembagaan, pola koordinasi, hingga model tata kelola. Kerangka ini menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu adaptif dan kreatif dalam menghadapi persoalan mendesak seperti bencana banjir. Selain itu, *digital governance* menjadi pilar utama transformasi birokrasi modern. Digitalisasi melalui *e-government*, *big data*, *artificial intelligence*, dan *digital collaboration* memungkinkan tata kelola yang lebih efisien, terbuka, dan responsif (Löffler, 2020:88; Janssen & van der Voort, 2020; Kettunen & Kallio, 2021). Teknologi juga menjadi instrumen strategis dalam manajemen bencana, seperti penguatan sistem peringatan dini, monitoring cuaca, hingga koordinasi lintas instansi secara *real-time*.

Dalam lima tahun terakhir, teori *co-production* dan *collaborative governance* juga menonjol. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam penyediaan layanan publik dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintahan (Head, 2021; Crosby et al., 2022; Jilke et al., 2022; Bovaird & Löffler, 2020:65). Pemerintah daerah yang menerapkan pendekatan kolaboratif akan lebih mampu memahami kebutuhan riil masyarakat dan menyusun program penanganan masalah publik secara lebih tepat, terutama dalam konteks kebencanaan.

Selain itu, teori *Public Value* kembali menjadi fondasi penting dalam diskursus administrasi negara kontemporer. Tujuan administrasi negara tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menghasilkan nilai publik seperti keselamatan, pemerataan layanan, partisipasi warga, serta keadilan sosial (Stoker, 2020:77; Stoker, 2020:82; Stoker, 2020:61). Nilai publik menjadi ukuran utama keberhasilan tata kelola modern.

Secara keseluruhan, perkembangan teori Administrasi Negara dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran dari birokrasi tradisional menuju tata kelola yang lebih inklusif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Pemerintahan modern dituntut adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan publik, serta mampu menciptakan mekanisme tata kelola yang menekankan partisipasi, kolaborasi, dan penciptaan nilai publik. Pemahaman terhadap teori-teori kontemporer tersebut memberikan landasan komprehensif dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam penanggulangan bencana banjir, karena mencakup perspektif *governance*, inovasi, teknologi, serta kolaborasi multipihak.

2.1.2 Teori Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi demi mencapai tujuan jangka panjang secara efektif (2020:15; 2021:6; 2020:21; 2018:32). Dalam konteks pemerintahan, manajemen strategis menjadi landasan penting bagi instansi publik dalam mengelola sumber daya, merespons perubahan lingkungan, dan menciptakan pelayanan yang bernilai bagi masyarakat. Perkembangan teori manajemen strategis dalam beberapa dekade terakhir

menunjukkan bahwa konsep ini tidak lagi sekadar berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang, tetapi juga pada kemampuan adaptasi, inovasi, kolaborasi, serta ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan.

Pada dekade awal perkembangannya, manajemen strategis dipahami sebagai proses linear yang terdiri dari analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Namun literatur terbaru memandang manajemen strategis sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang memerlukan integrasi antara analisis internal dan eksternal (2020:40; 2021:58; 2021:12; 2020:44). Organisasi publik dituntut untuk mampu melakukan *strategic scanning* agar strategi yang dirumuskan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam konteks pemerintahan daerah, proses ini penting mengingat dinamika politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berubah dengan cepat sehingga strategi penanganan masalah publik harus selalu diperbarui.

Teori manajemen strategis kontemporer juga menekankan pentingnya *strategic alignment*, yaitu kesesuaian antara strategi organisasi dengan struktur, budaya, serta sumber daya yang dimiliki (2021:25; 2020:63; 2022:18; 2020:70). Strategi yang efektif bukan hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga kemampuan organisasi dalam menyesuaikan mekanisme kerja serta kapasitas sumber daya manusia dengan arah strategis yang ditetapkan. Dalam sektor publik, hal ini melibatkan penyelarasan kebijakan daerah, regulasi, implementasi program, serta kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian antara strategi dan

implementasi sering kali menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan publik, terutama di sektor yang memerlukan respons cepat seperti kebencanaan dan pengelolaan lingkungan.

Selain itu, literatur modern memasukkan konsep *strategic leadership* sebagai elemen penting dalam manajemen strategis. Pemimpin strategis harus memiliki visi jangka panjang, kemampuan adaptif, serta kompetensi dalam mengelola ketidakpastian (2020:75). Dalam organisasi publik, kepemimpinan strategis diwujudkan melalui kemampuan kepala daerah dan pimpinan instansi dalam mengoptimalkan sumber daya, membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan implementasi strategi. Kepemimpinan strategis berperan penting dalam efektivitas kebijakan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Teori manajemen strategis mutakhir juga menekankan pentingnya *strategic governance*, yaitu kemampuan pemerintah mengelola jejaring kolaborasi untuk mencapai tujuan strategis (2022:20; 2022:14; 2020:80; 2020:66). Pemerintah modern tidak dapat bekerja secara isolatif. Penyelesaian isu publik yang kompleks, seperti bencana banjir, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan *collaborative governance* dianggap mampu meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat legitimasi publik.

Dalam perkembangan lain, teori manajemen strategis dikaitkan dengan konsep *organizational resilience*, yaitu kemampuan organisasi untuk bertahan,

beradaptasi, dan pulih dari tekanan lingkungan (2020:220; 2021:45; 2021:60; 2023:55). Organisasi yang memiliki resiliensi strategis mampu meminimalkan dampak gangguan serta mempercepat pemulihan. Konsep ini sangat relevan bagi organisasi publik yang menangani kebencanaan, termasuk pemerintah daerah di wilayah rawan banjir. Resiliensi strategis menjadi indikator apakah strategi pemerintah tidak hanya baik secara perencanaan, tetapi juga efektif dalam menghadapi situasi krisis.

Secara keseluruhan, teori manajemen strategis menyediakan kerangka komprehensif untuk menganalisis bagaimana pemerintah merancang arah pembangunan, mengalokasikan sumber daya, menghadapi tekanan lingkungan, serta menciptakan layanan publik yang efektif. Melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dengan demikian, penerapan teori manajemen strategis menjadi sangat penting dalam penelitian terkait kinerja, efektivitas, dan formulasi kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah.

2.1.3 Teori Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan salah satu konsep utama dalam manajemen kebencanaan yang berfokus pada upaya mengurangi risiko, dampak, serta kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Secara teoretis, mitigasi bencana tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis, tetapi juga sebagai proses perencanaan, pencegahan, tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam literatur kebencanaan modern, mitigasi dipandang sebagai strategi yang harus dilakukan secara

komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang dengan melibatkan seluruh *stakeholders* (2020: 25; 2021: 40; 2020: 12).

Menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction*, mitigasi merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau mencegah konsekuensi bencana melalui perencanaan tata ruang, peningkatan kapasitas kelembagaan, adaptasi perubahan iklim, manajemen sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran masyarakat (2020: 18). Pendekatan ini menekankan bahwa bencana bukan sekadar fenomena alam, tetapi merupakan hasil interaksi antara *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Karena itu, mitigasi harus diarahkan pada pengurangan kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan hanya mengandalkan respons kedaruratan setelah bencana terjadi (2021: 52; 2022: 33).

Dalam lima tahun terakhir, teori mitigasi bencana berkembang melalui paradigma *Disaster Risk Reduction (DRR)* yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Risiko bencana muncul akibat tekanan struktural seperti ketimpangan sosial, lemahnya tata kelola, degradasi lingkungan, dan kurangnya kapasitas masyarakat (2021: 60). Mitigasi dalam perspektif *DRR* dilakukan melalui identifikasi risiko, pemetaan kerentanan, peningkatan kapasitas komunitas, edukasi kebencanaan, serta integrasi mitigasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah (2022: 44; 2019: 28).

Teori *Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM)* juga semakin menonjol dalam literatur terbaru. Mitigasi bencana yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat (2023: 50). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan lokal, partisipasi

warga, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat. Dengan *CBDRM*, strategi mitigasi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis suatu wilayah, sehingga lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (2021: 35; 2020: 41).

Selain itu, muncul konsep *Climate Change Adaptation (CCA)* yang dipandang sebagai bagian integral dari mitigasi bencana. Perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan ekstrem, banjir, dan kenaikan permukaan air sehingga pemerintah perlu mengintegrasikan adaptasi iklim dalam strategi mitigasi (2022: 66). Adaptasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur hijau, penguatan daerah resapan air, rehabilitasi daerah aliran sungai (*DAS*), hingga pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi (2020: 77; 2020: 102).

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori mitigasi bencana terkait erat dengan prinsip *good governance* dalam manajemen kebencanaan. Keberhasilan mitigasi dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan yang transparan, koordinasi antarsektor, penyediaan data kebencanaan yang akurat, pendanaan yang memadai, dan regulasi yang tegas (2020: 30). Pemerintah daerah memegang peran sentral karena berada pada garis terdepan dalam penyusunan kebijakan, implementasi program mitigasi, dan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ketika tata kelola dan koordinasi lemah, mitigasi bencana tidak dapat berjalan efektif meskipun sumber daya teknis tersedia (2021: 48; 2020: 20).

Secara keseluruhan, teori mitigasi bencana kontemporer memandang upaya mitigasi sebagai proses multidisipliner yang melibatkan kolaborasi berbagai

aktor dan harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Mitigasi tidak hanya bertujuan mengurangi dampak fisik bencana, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Dengan memahami teori ini, penelitian mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir dapat dianalisis secara lebih komprehensif, terutama dalam menilai kesiapsiagaan, kapasitas mitigasi, kebijakan tata ruang, serta koordinasi antarlembaga di tingkat daerah.

2.1.4 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam seperti banjir. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan pemerintah sering kali hanya berjalan secara *top-down* dan tidak mampu menjangkau kebutuhan nyata di tingkat lokal. Konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas beberapa tingkatan, mulai dari bentuk partisipasi simbolik hingga partisipasi penuh di mana warga memiliki kekuasaan nyata untuk mempengaruhi keputusan (*citizen power*) (1969: 217). Kerangka ini menegaskan bahwa partisipasi sejati bukan hanya kehadiran masyarakat dalam kegiatan pemerintah, tetapi keterlibatan mereka secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Dalam konteks penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat tidak hanya penting sebagai pelengkap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mitigasi yang efektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir di berbagai daerah Indonesia terbukti

memperkuat kesiapsiagaan karena warga adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya (2022: 10; 2023: 95). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi seperti pembuatan saluran air, reboisasi, pengawasan terhadap pembangunan di daerah rawan banjir, serta edukasi kebencanaan menjadi bentuk nyata tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (2023: 300; 2023: 12). Dengan adanya upaya partisipatif tersebut, masyarakat menjadi lebih tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat memicu bencana.

Lebih lanjut, keberhasilan penanggulangan bencana akan meningkat apabila terdapat kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat lokal, sebagaimana ditunjukkan melalui program kelompok siaga bencana dan latihan evakuasi di berbagai wilayah (2023: 185; 2024: 82). Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial dalam menghadapi ancaman banjir. Pendekatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga implementasi program menjadi lebih berkelanjutan (2022: 468).

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi kebencanaan, minimnya dukungan pemerintah, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Meski demikian, teori partisipasi menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya dapat teratasi melalui kekuatan sosial dan pengorganisasian komunitas (2024: 5). Keterlibatan warga dalam pemantauan debit air, pelaporan dini, pembersihan

sungai, dan pengelolaan lingkungan menjadi contoh konkret kontribusi masyarakat dalam mengurangi risiko banjir secara signifikan (2023: 6).

Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Desa Sungai Langsat, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana keberhasilan strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah tidak akan mampu menjalankan strategi penanggulangan banjir secara efektif tanpa dukungan warga, terutama dalam kegiatan seperti normalisasi sungai, penanganan sedimentasi, serta pelaporan potensi penyumbatan (2014: 50; 2025: 8). Pada tahap tanggap darurat, masyarakat juga berperan penting dalam evakuasi mandiri, penyaluran bantuan, dan penyediaan informasi lapangan bagi pemerintah.

Selain itu, teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya membangun kepercayaan (*trust building*) antara pemerintah dan warga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dan didengar aspirasinya, tingkat dukungan terhadap kebijakan pemerintah meningkat. Sebaliknya, apabila warga hanya diposisikan sebagai objek, partisipasi dapat menurun (1969: 220; 2022: 12). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam strategi penanggulangan banjir, bukan sekadar pelengkap administratif.

Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat menjadi kerangka konseptual penting dalam penelitian mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat. Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah dapat membangun sinergi yang lebih kuat antara aparat, lembaga, dan masyarakat untuk menciptakan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya mempercepat tanggap darurat, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun ketahanan sosial dan lingkungan di wilayah rawan banjir.

2.1.5 Teori Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses terpadu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta koordinasi berbagai sumber daya untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat (2020: 10; 2022: 15). Dalam teori administrasi publik modern, manajemen bencana tidak hanya dipahami sebagai kegiatan darurat, tetapi sebagai siklus berkelanjutan yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (2020: 22). Pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan tata kelola risiko bencana, namun tetap mendorong kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan institusi akademik (2021: 40).

Menurut Coppola, manajemen bencana adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi dengan tujuan meminimalkan risiko serta mempercepat proses pemulihan (2020: 30). Dalam kerangka ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses multidisipliner yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, teknis, dan lingkungan (2021: 55). Pemerintah dituntut untuk mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis potensi ancaman, memetakan kerentanan, serta mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa risiko bencana bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga hasil dari kegagalan dalam tata kelola, perencanaan ruang, serta ketidaksiapan masyarakat (2022: 20; 2023: 35).

Dalam literatur terbaru, teori manajemen bencana juga dipengaruhi oleh paradigma *Disaster Risk Management (DRM)* yang dikembangkan oleh *UNDRR* (2022: 18). *DRM* menekankan bahwa manajemen bencana harus dilakukan secara sistemik melalui integrasi kebijakan tata ruang, penguatan kapasitas kelembagaan, sistem informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang tangguh (2021: 27). Pendekatan *DRM* memperluas konsep penanganan bencana yang sebelumnya lebih berorientasi pada tanggap darurat menjadi pendekatan proaktif dan berbasis risiko jangka panjang. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh tahapan *DRM* diimplementasikan melalui kebijakan yang konsisten dan terukur (2023: 14).

Teori manajemen bencana modern juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan (*preparedness*) sebagai salah satu pilar utama. Kesiapsiagaan mencakup kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merespons bencana melalui pelatihan, simulasi, peringatan dini, penyediaan logistik, serta sistem komunikasi yang efektif (2021: 60). Kesiapsiagaan menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu meminimalkan dampak bencana pada saat kejadian berlangsung (2020: 12). Dalam konteks daerah rawan banjir, kesiapsiagaan sangat bergantung pada kecepatan sistem peringatan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan masyarakat mengevakuasi diri (2022: 110).

Selain kesiapsiagaan, teori manajemen bencana juga menekankan pentingnya tanggap darurat (*response*) sebagai langkah cepat yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan jiwa, menyediakan bantuan dasar, dan

memulihkan kondisi awal. Keberhasilan tanggap darurat sangat ditentukan oleh struktur komando yang jelas, kecepatan pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya yang efektif (2020: 45). Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme koordinasi yang kuat dengan BPBD, TNI, Polri, tenaga medis, relawan, dan pihak swasta agar penanganan bencana berjalan efektif (2023: 18).

Tahap selanjutnya adalah pemulihan (*recovery*), yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan ketahanan, serta penguatan kapasitas lokal agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan (2021: 70). Pemulihan yang berkelanjutan harus diintegrasikan dengan mitigasi sehingga siklus manajemen bencana dapat berlangsung secara konsisten dan mendorong terwujudnya ketahanan jangka panjang (2023: 40).

Dalam literatur lima tahun terakhir, muncul pula konsep *disaster resilience* yang kini menjadi bagian penting dari teori manajemen bencana. Resiliensi merujuk pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, serta pulih lebih cepat dari bencana (2020: 220). Resiliensi tidak hanya mengandalkan respons, tetapi juga kemampuan sistemik organisasi untuk meningkatkan pembelajaran, koordinasi, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi ketidakpastian (2022: 9). Pemerintah daerah yang memiliki resiliensi tinggi biasanya memiliki strategi berbasis data, kolaborasi multi-aktor, serta kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan risiko jangka panjang (2022: 25; 2024: 10).

Secara keseluruhan, teori manajemen bencana kontemporer memandang penanggulangan bencana sebagai proses yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah harus berperan sebagai pengelola risiko, fasilitator kolaborasi, pengarah kebijakan, dan pelindung masyarakat (2021: 33). Penerapan teori ini sangat relevan dalam penelitian tentang penanggulangan banjir, terutama dalam memahami bagaimana strategi pemerintah daerah bergerak dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan secara menyeluruh (2023: 22; 2022: 115).

Selain pemahaman mengenai *DRM*, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, serta resiliensi bencana yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan literatur terbaru juga menekankan pentingnya *resilience governance* sebagai perluasan dari teori manajemen bencana modern. *Resilience governance* merupakan pendekatan tata kelola yang berfokus pada bagaimana pemerintah, komunitas lokal, dan berbagai aktor lainnya mampu membangun kapasitas adaptif terhadap guncangan dan ketidakpastian bencana secara jangka panjang. Tata kelola yang berketahanan memiliki karakteristik reflektif, *robust*, fleksibel, terintegrasi, serta inklusif (2025: 6). Konsep ini sangat relevan dalam konteks pemerintah daerah yang menangani banjir berulang karena upaya penanggulangan bencana membutuhkan penguatan kebijakan yang adaptif, bukan hanya responsif.

Selanjutnya, literatur manajemen bencana terbaru juga memperkenalkan konsep *Adaptive Disaster Management (ADM)* sebagai pendekatan baru yang menggabungkan prinsip manajemen strategis dengan dinamika risiko bencana yang berubah-ubah. Dalam pendekatan *ADM*, proses manajemen bencana tidak

dipandang sebagai siklus linier, melainkan sebagai proses adaptif yang membutuhkan evaluasi terus-menerus dan kemampuan mengubah strategi sesuai situasi (2023: 12). Pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu membaca perubahan iklim, peningkatan intensitas hujan, urbanisasi, dan degradasi lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi pola banjir.

Kemudian, teori manajemen strategis juga berkembang melalui konsep *Public Service Logic (PSL)* yang menekankan *co-creation* dalam penciptaan nilai publik. Keberhasilan kebijakan publik, termasuk manajemen bencana, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (2022: 20). Dalam konteks penanggulangan banjir, *PSL* menegaskan bahwa strategi pemerintah tidak akan optimal tanpa partisipasi masyarakat dalam mitigasi, edukasi kebencanaan, dan perencanaan tata ruang berbasis risiko.

Selain itu, pendekatan *Collaborative Governance* menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga sebagai kunci keberhasilan penanggulangan bencana (2022: 15). Pemerintah harus membangun mekanisme koordinasi formal dengan berbagai instansi untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif dalam menghadapi bencana yang bersifat multidimensi.

Penguatan teori manajemen strategis dalam konteks kebencanaan juga diperkaya dengan konsep *strategic agility*, yaitu kemampuan pemerintah dalam beradaptasi dengan cepat melalui pengambilan keputusan yang responsif, penggunaan data *real-time*, serta inovasi dalam menghadapi ketidakpastian (2024: 9).

Terakhir, konsep *climate adaptive governance* menekankan pentingnya integrasi adaptasi perubahan iklim dalam manajemen bencana. Perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir sehingga kebijakan harus berorientasi pada adaptasi jangka panjang (2023: 55). Pendekatan ini mencakup pengelolaan DAS, tata ruang berbasis risiko, reforestasi, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Dengan demikian, perluasan teori manajemen ini memperkaya kerangka konseptual penelitian dengan menggabungkan *DRM*, resiliensi bencana, *collaborative governance*, *strategic agility*, dan *climate adaptive governance* sebagai landasan ilmiah yang komprehensif dan mutakhir. Semua konsep tersebut saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang kuat mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dalam penanggulangan banjir.

2.1.6 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjawab persoalan publik, mengalokasikan nilai, serta mengatur tindakan kolektif demi mencapai tujuan tertentu (2020: 5; 2020: 112; 2020: 10; 2020: 45). Dalam perspektif administrasi negara, kebijakan publik menjadi instrumen utama bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan merespons berbagai dinamika sosial seperti bencana, kemiskinan, dan konflik kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dipahami sebagai tindakan pemerintah yang berorientasi pada pemecahan masalah melalui *formulation*, *implementation*, dan *evaluation* secara sistematis,

sehingga kebijakan bukan sekadar dokumen formal, tetapi proses berkelanjutan yang terus menyesuaikan perubahan lingkungan (2020: 15).

Proses perumusan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aktor kebijakan, dinamika politik, kapasitas birokrasi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan publik terbentuk ketika pemerintah merespons isu yang dianggap penting oleh publik maupun aktor kunci, sehingga proses *agenda setting* menjadi pintu masuk utama bagi lahirnya kebijakan (2020: 22).

Dalam konteks administrasi negara, kapasitas birokrasi dalam mengidentifikasi masalah, mengolah data, dan menyusun alternatif kebijakan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Proses kebijakan berlangsung dalam lingkungan kompleks yang dipengaruhi oleh jejaring aktor, struktur institusi, dan keterbatasan informasi (2023: 30).

Implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Pelaksana kebijakan tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) sangat menentukan efektivitas kebijakan karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat (2021: 12). Ketika kapasitas birokrasi rendah, koordinasi tidak efektif, atau sumber daya terbatas, implementasi kebijakan rentan mengalami distorsi. Oleh sebab itu, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kelayakan implementasi, kesiapan institusi, serta dukungan politik yang memadai. Kualitas pelayanan birokrasi sangat memengaruhi persepsi publik dan efektivitas implementasi (2022: 210).

Tahap evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai tujuan. Evaluasi memungkinkan pemerintah menilai efektivitas, efisiensi, *responsiveness*, dan dampak kebijakan (2020: 80; 2020: 20; 2022: 15; 2022: 25). Dalam konteks kebencanaan, evaluasi menjadi krusial untuk mengukur kelemahan koordinasi antarlembaga, memperkuat kapasitas pemerintah, serta menilai keberlanjutan strategi yang dijalankan. *Evidence-based policy* mendorong pemerintah untuk menggunakan data empiris dalam merumuskan perbaikan kebijakan (2021: 40).

Dalam konteks penanggulangan bencana, teori kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka analisis yang membantu menjelaskan bagaimana pemerintah merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan kebencanaan. Kebijakan penanggulangan bencana menuntut sinergi antaraktor, koordinasi pemerintahan *multilevel*, serta integrasi regulasi yang sesuai kondisi lokal. Kebijakan kebencanaan harus berbasis risiko, inklusif, dan mengintegrasikan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan (2019: 8; 2020: 28; 2021: 55; 2021: 65). Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengurangi risiko jangka panjang.

Secara keseluruhan, teori kebijakan publik memberikan fondasi konseptual bagi pemerintah dalam mengelola isu publik, termasuk isu hidrometeorologi seperti banjir. Keberhasilan proses kebijakan bergantung pada kualitas analisis masalah, formulasi kebijakan yang tepat, implementasi yang terkoordinasi, serta evaluasi berbasis bukti. Melalui pendekatan kebijakan publik yang komprehensif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang responsif, adaptif, dan

berkelanjutan dalam upaya mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul & Penulis (Tahun)	Metode & Lokasi	Temuan Inti	Relevansi
1	Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Pangean, Kab. Kuantan Singingi Desriadi & Ihsanul Hamid (UNIKS).	Studi kualitatif deskriptif; lokasi: Kecamatan Pangean (Kab. Kuantan Singingi).	Pemerintah daerah melakukan perbaikan fisik (tanggul, normalisasi sungai) dan kegiatan sosialisasi, tetapi implementasi terhambat anggaran dan koordinasi antarlembaga.	Sangat relevan — konteks kabupaten sama; memberikan gambaran kelemahan implementasi strategi mitigasi lokal.
2	Identifikasi Kawasan Rawan Banjir di Kecamatan Pangean, Kab. Kuantan Singingi (Jupersatek / UNIKS).	Metode pemetaan / SIG dan analisis data curah hujan; lokasi: Kecamatan Pangean dan kecamatan lain di Kuansing.	Mengidentifikasi desa-desa yang rawan banjir (termasuk area di Sub DAS Pangean); rekomendasi tata ruang dan prioritas mitigasi berbasis SIG.	Relevan untuk peta kerawanan desa Sungai Langsat dan bukti kebutuhan intervensi berbasis ruang
3	Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Banjir (Sub DAS Pangean), Kab. Kuantan Singingi MM Putra (repository UIR).	Kuantitatif + overlay SIG; lokasi: Sub DAS Pangean.	Menunjukkan tingkat kerawanan tinggi di Sub DAS Pangean; faktor penyebab: topografi, perubahan penggunaan lahan, drainase buruk.	Memberi landasan empiris penyebab banjir lokal; berguna untuk analisis faktor penyebab pada Sungai Langsat.
4	Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas PU	Pengembangan SIG untuk pemetaan rawan banjir; studi kasus Kuansing.	SIG efektif memetakan area rawan dan membantu perumusan kebijakan mitigasi	Relevan untuk metode (bisa jadi komparatif / penunjang peta risiko di Sungai Langsat).

	Kota Manado) N. Metuak (2022).		berbasis bukti.	
5	Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas PU Kota Manado) N. Metuak (2022).	Studi kualitatif kasus Dinas PU; lokasi: Manado.	Strategi teknis (infrastruktur), kelembagaan (koordinasi), dan kelemahan pendanaan/dokumen perencanaan; menyorot pentingnya monitoring & evaluasi.	Bermanfaat sebagai pembanding kebijakan/strategi daerah lain: menunjukkan pola umum masalah strategi daerah.
6	Studi Perencanaan Tanggul untuk Pengendalian Banjir di Sungai (analisis lokal) Hermawan et al. (Prosiding UNIKS, 2023).	Teknik/hidrologi perencanaan tanggul dan analisis debit (Sungai lokal Kuansing).	Rekomendasi teknis untuk desain tanggul; penekanan pada data hidrologi lokal untuk desain efektif.	Berguna untuk solusi teknis (mitigasi struktural) terhadap banjir Sungai Langsat.

Penelitian tentang penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi dan daerah sekitarnya menunjukkan pola temuan yang konsisten: pertama, adanya konsentrasi kerawanan di DAS/Sub-DAS tertentu (termasuk Sub DAS Pangean) yang disebabkan oleh kombinasi faktor fisik (topografi dataran rendah, pola aliran sungai, intensitas hujan) dan faktor antropogenik (perubahan penggunaan lahan, drainase yang tersumbat, tata ruang yang kurang teratur). Studi identifikasi kawasan rawan yang dilakukan oleh peneliti di daerah baik yang dipublikasikan dalam jurnal lokal maupun repositori universitas menguatkan bahwa pemetaan berbasis SIG menjadi alat penting untuk menentukan prioritas intervensi. Temuan ini relevan langsung dengan Desa Sungai Langsat: jika Sungai Langsat terletak di

Sub DAS Pangean atau di zona dataran rendah, maka kajian-kajian tersebut memberi dasar empiris bahwa penanganan harus bersifat lokasi-spesifik dan didasarkan pada peta kerawanan yang valid.

Kedua, banyak studi lokal (mis. penelitian di Pangean dan artikel prosiding teknik di UNIKS) menekankan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pendanaan sebagai hambatan utama implementasi strategi. Penelitian deskriptif di Kecamatan Pangean menemukan bahwa meskipun ada program fisik (normalisasi sungai, pembuatan tanggul) dan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan kurang optimal karena alokasi anggaran tidak memadai dan koordinasi antarlembaga sering terlambat atau tumpang tindih. Hal ini menandakan bahwa formulasi strategi oleh pemerintah daerah sering tidak diikuti oleh mekanisme implementasi yang kuat sebuah masalah yang harus dianalisis dalam kasus Sungai Langsat, misalnya: apakah rencana tenggelam di atas kertas, atau nyata di lapangan?

Ketiga, studi-studi teknis yang meneliti desain tanggul atau infrastruktur pengendalian banjir menyorot perlunya data hidrologi dan perhitungan debit yang akurat. Rekomendasi teknis (seperti pada prosiding UNIKS) menekankan pemakaian metode hidrologi yang tepat dan pengukuran lapangan sebelum membangun struktur. Ini penting untuk penelitianmu karena strategi pemerintah daerah mencakup aspek struktural jika pemerintah lokal merencanakan konstruksi fisik di Sungai Langsat, penelitianmu harus mengkaji sejauh mana keputusan itu berbasis data atau lebih reaktif.

Keempat, literatur tentang SIG dan pemetaan rawan banjir di Kuansing menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti *(evidence-based planning)* jauh

lebih efektif. Penggunaan SIG membantu memprioritaskan lokasi intervensi, merencanakan jalur evakuasi, dan menyesuaikan tata ruang. Penelitian SIG lokal merekomendasikan agar pemerintah daerah mengintegrasikan hasil peta rawan ke dalam perencanaan ruang dan program mitigasi tahunan. Bagi kasus Sungai Langsat, ini membuka peluang metodologis: kamu bisa menggunakan atau mereplikasi peta SIG tersebut untuk memetakan risiko di desa itu, lalu mengaitkannya dengan strategi pemerintah.

Kelima, studi banding di luar kabupaten (mis. studi di Dinas PU Kota Manado) memperlihatkan bahwa strategi daerah efektif bila menyatukan tiga elemen: (1) intervensi teknis (infrastruktur), (2) penguatan kelembagaan & pendanaan, dan (3) partisipasi masyarakat (*awareness* & kesiapsiagaan). Penelitian ini menegaskan pola umum yang juga muncul di Kuansing: solusi tunggal jarang berhasil bila tidak diiringi perbaikan tata kelola dan partisipasi publik. Untuk penelitian kamu, hal ini berarti analisis strategi harus multi-dimensi tidak hanya kebijakan atau infrastruktur, tetapi juga koordinasi antar-dinas, aliran pendanaan, dan keterlibatan warga Desa Sungai Langsat.

Sintesis temuan-temuan terdahulu mengindikasikan beberapa celah penelitian yang cocok untuk studi kasus peneliti:

1. Spesifikasi lokal Sungai Langsat: belum ada (atau sangat sedikit) kajian yang fokus pada Desa Sungai Langsat secara spesifik ini adalah celah (gap) yang kuat untuk penelitianmu. (Sumber: ringkasan *Repository* UNIKS & Jupersatek yang memetakan kecamatan, bukan desa tertentu).

2. Keterhubungan antara perencanaan berbasis SIG dan realisasi anggaran/implementasi: banyak peta rawan, tetapi sedikit studi evaluasi apakah peta tersebut mempengaruhi alokasi anggaran dan tindakan di lapangan. (Sumber: SIG *studies* & evaluasi implementasi Pangean).
3. Analisis peran aktor lokal (BPBD, Dinas PU, masyarakat adat/petani) dalam strategi: penelitian terdahulu menunjukkan fragmentasi peran perlu analisis mendalam per aktor di Sungai Langsat

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran tentang strategi pemerintah dalam Penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Modifkasi Peneliti 2026

Penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sungai Langsat, dapat dianalisis melalui dua pendekatan konseptual utama, yaitu mitigasi bencana dan manajemen strategis pemerintah daerah. Kedua pendekatan

ini saling melengkapi dan membentuk kerangka berpikir yang sistematis dalam mencapai tujuan penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan.

Pertama, mitigasi bencana merupakan langkah proaktif yang bertujuan mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi. Berdasarkan literatur manajemen bencana, mitigasi dapat dibagi menjadi mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural (2020:45; 2022:18). Mitigasi struktural berfokus pada pembangunan fisik untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan akibat banjir, seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan tanggul. Konsep ini sejalan dengan paradigma *Disaster Risk Management* yang menekankan pentingnya infrastruktur tangguh sebagai bentuk kesiapsiagaan wilayah rawan banjir (2021:32). Sementara itu, mitigasi non-struktural menekankan pendekatan berbasis masyarakat dan kebijakan, termasuk edukasi kebencanaan, sistem peringatan dini, serta penataan ruang berbasis risiko. Strategi ini mencerminkan penerapan konsep *community resilience* dan *adaptive governance*, yang menekankan partisipasi masyarakat dan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal (2020:12; 2025:27). Dengan demikian, mitigasi bencana tidak hanya mengurangi kerusakan fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptif masyarakat.

Kedua, *manajemen strategis* pemerintah daerah menjadi kerangka penting dalam penanggulangan banjir karena memungkinkan perencanaan, koordinasi, serta evaluasi strategi secara berkelanjutan. Berdasarkan teori *strategic management*, manajemen strategis mencakup perumusan strategi, implementasi melalui koordinasi antarinstansi, serta monitoring dan evaluasi (2017:15). Perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan data risiko banjir,

proyeksi curah hujan, serta kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Tahap implementasi menekankan kolaborasi antarinstansi, termasuk BPBD, Dinas PU, TNI/Polri, dan lembaga non-pemerintah, sesuai konsep *collaborative governance* yang menekankan koordinasi multi-aktor dalam menyelesaikan isu kompleks (2022:20). Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus agar strategi penanggulangan banjir adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan risiko hidrometeorologi, sesuai prinsip *adaptive disaster management* (2023:35).

Integrasi antara mitigasi bencana dan manajemen strategis membentuk kerangka konseptual yang holistik. Mitigasi struktural dan non-struktural merupakan bentuk implementasi *Disaster Risk Management*, sedangkan manajemen strategis yang adaptif dan kolaboratif memastikan keberlanjutan serta efektivitas kebijakan. Pendekatan ini juga memperkuat resiliensi organisasi dan masyarakat (*organizational resilience* dan *resilience governance*), sehingga pemerintah daerah mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan lingkungan akibat banjir (2020:18; 2025:29). Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada mitigasi fisik, tetapi juga pada manajemen strategis yang adaptif, terkoordinasi, dan berbasis bukti. Outcome yang diharapkan adalah tercapainya penanggulangan banjir yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang dapat mengurangi kerentanan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif daerah terhadap risiko bencana di masa depan.

2.2.1 Unsur-Unsur penting Dalam Kerangka Berpikir

Penelitian mengenai *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Desa Sungai Langsat* memiliki beberapa unsur penting yang menjadi dasar analisis. Unsur-unsur ini diperlukan agar penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir. Unsur tersebut disusun berdasarkan kerangka teori mitigasi bencana serta teori manajemen strategis yang relevan dengan konteks penelitian.Unsur pertama dalam kerangka berpikir ini adalah teori implementasi kebijakan, yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam konteks penanggulangan banjir, teori ini penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta bagaimana kendala seperti kurangnya koordinasi dan sumber daya dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan.

Unsur kedua adalah teori manajemen bencana, yang menekankan pada proses sistematis dalam menghadapi bencana melalui empat tahapan utama: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Dalam konteks Desa Sungai Langsat, teori ini digunakan untuk menilai apakah strategi pemerintah telah mencakup langkah-langkah komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-banjir, tetapi juga upaya pencegahan dan kesiapan sebelum bencana terjadi. Unsur ini memberikan landasan penting untuk memahami sejauh

mana sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah telah berjalan secara terpadu.

Selanjutnya, unsur ketiga adalah teori *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi publik. Unsur ini sangat relevan karena strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir tidak hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan hasil kebijakannya. Prinsip *good governance* menjadi ukuran apakah pemerintah daerah mampu menjalankan perannya secara terbuka, jujur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Unsur keempat adalah teori partisipasi masyarakat, yang menegaskan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap risiko banjir. Partisipasi ini dapat berupa kegiatan gotong royong, pengawasan terhadap pembangunan yang berisiko banjir, hingga keterlibatan dalam perencanaan kebijakan lokal. Unsur ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan strategi pemerintah sangat bergantung pada tingkat kolaborasi dan kesadaran kolektif masyarakat.

Unsur terakhir dalam kerangka berpikir ini adalah hubungan antara teori-teori tersebut dalam konteks penelitian. Implementasi kebijakan memberikan gambaran tentang bagaimana strategi pemerintah dijalankan; manajemen bencana

menjelaskan tahapan teknis dan sistematisnya; *good governance* menjadi pedoman etika dan tata kelola yang baik; sedangkan partisipasi masyarakat menjadi penguat dalam pelaksanaan di lapangan. Semua unsur tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi banjir di Desa Sungai Langsat diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya.

Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam kerangka berpikir ini memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menganalisis hubungan antara teori dan realitas di lapangan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi peningkatan strategi penanggulangan banjir yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Unsur-unsur penting dalam penelitian mengenai *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Desa Sungai Langsat, Kabupaten Kuantan Singingi* disusun berdasarkan dua landasan teori utama, yaitu teori mitigasi bencana dan teori manajemen strategis. Kedua teori tersebut memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan upaya penanggulangan banjir secara komprehensif.

Unsur pertama yang menjadi fokus penelitian adalah mitigasi bencana, baik mitigasi struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural mencakup langkah-langkah fisik seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan drainase. UNDRR (2020) menjelaskan bahwa mitigasi struktural

merupakan upaya teknis yang dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya melalui rekayasa fisik dan peningkatan infrastruktur. Sedangkan mitigasi non-struktural meliputi edukasi kebencanaan, penyusunan tata ruang berbasis risiko, serta penguatan sistem peringatan dini. Wisner, Gaillard, dan Kelman (2021) menegaskan bahwa mitigasi non-struktural memainkan peran penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Selain mitigasi, unsur penting lainnya adalah kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, yang merupakan bagian dari pendekatan *Community-Based Disaster Risk Management* (CBDRM). Gaillard dan Gomez (2023) menyatakan bahwa masyarakat lokal merupakan aktor kunci dalam pengurangan risiko bencana, karena merekalah yang pertama kali merasakan dampak dan sekaligus menjadi pihak yang paling cepat bereaksi. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat mengenai potensi banjir, kemampuan membaca tanda bahaya, serta partisipasi dalam kegiatan pencegahan seperti pembersihan sungai, sangat menentukan keberhasilan strategi pemerintah daerah.

Unsur berikutnya adalah perumusan strategi pemerintah daerah, yang diambil dari teori manajemen strategis. Menurut David dan David (2021), perumusan strategi melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan prioritas tindakan. Dalam penelitian ini, perumusan strategi mencakup penentuan penyebab banjir, analisis wilayah rawan, serta penetapan program mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Perumusan strategi ini merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah

yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik geografis wilayah.

Setelah perumusan, unsur selanjutnya adalah implementasi strategi. Hitt, Ireland, dan Hoskisson (2020) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses mengubah rencana menjadi tindakan konkret melalui koordinasi instansi, distribusi sumber daya, serta pembagian peran yang jelas. Dalam konteks penanggulangan banjir, implementasi melibatkan BPBD, Dinas PUPR, pemerintah desa, serta masyarakat sebagai mitra strategis. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi yang efektif dan memastikan keselarasan antarinstansi.

Unsur terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa strategi penanggulangan banjir berjalan sesuai tujuan. Wheelen dan Hunger (2020) menjelaskan bahwa evaluasi strategi diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kendala lapangan, serta memberikan dasar bagi pengembangan strategi baru yang lebih efektif. Melalui proses evaluasi ini, pemerintah dapat memperbaiki kelemahan implementasi dan meningkatkan kualitas kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang.

Secara keseluruhan, unsur-unsur penting dalam penelitian ini meliputi mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi kebijakan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan memberikan struktur analitis untuk menilai efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko banjir di Desa Sungai Langsat.

2.3 Hipotase Kerja

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat) belum maksimal.

2.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa konsep kunci perlu didefinisikan secara operasional agar pelaksanaannya di lapangan dapat terukur dan terarah. Konsep pertama adalah strategi pemerintah daerah, yang dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai rangkaian keputusan, kebijakan, dan tindakan terencana yang disusun pemerintah berdasarkan analisis lingkungan untuk mengurangi risiko banjir di Desa Sungai Langsat. Strategi tersebut mencakup proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh David & David (2021) dan Hitt, Ireland, & Hoskisson (2020). Secara operasional, strategi pemerintah diamati melalui bagaimana pemerintah menyusun prioritas program, mengimplementasikan langkah penanggulangan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan yang telah dijalankan. Selanjutnya, konsep mitigasi bencana dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai seluruh upaya pemerintah sebelum bencana terjadi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak banjir, baik melalui tindakan fisik (struktural) maupun tindakan non-fisik (non-struktural). Menurut UNDRR (2020) dan Wisner et al. (2021), mitigasi mencakup kegiatan seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penyusunan tata ruang berbasis risiko, hingga edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, mitigasi diamati melalui sejauh mana pemerintah melaksanakan kedua bentuk upaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Konsep berikutnya adalah kesiapsiagaan masyarakat, yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan warga untuk mengenali risiko, mempersiapkan diri, serta mengambil tindakan cepat sebelum dan saat banjir terjadi. Mengacu pada Gaillard & Gomez (2023), kesiapsiagaan tidak hanya terkait pengetahuan masyarakat, tetapi juga keterlibatan mereka dalam kegiatan pencegahan seperti gotong royong pembersihan sungai dan kemampuan melakukan evakuasi mandiri. Dalam konteks Desa Sungai Langsat, kesiapsiagaan masyarakat menjadi penting karena mereka merupakan aktor pertama yang merasakan dampak ketika banjir terjadi. Selain itu, konsep koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam definisi operasional penelitian ini. Koordinasi dipahami sebagai proses sinkronisasi tugas, komunikasi, dan kerja sama antara BPBD, pemerintah daerah, desa, Dinas PUPR, serta lembaga terkait lainnya dalam upaya penanggulangan banjir. Crosby, ‘t Hart, & Torfing (2022) menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, alur komunikasi yang lancar, serta kerja sama lintas sektor yang konsisten.

Dalam penelitian ini, koordinasi diobservasi melalui mekanisme rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan bersama, serta kejelasan pembagian tugas antarinstansi. Konsep terakhir adalah dampak banjir, yang mengacu pada konsekuensi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana banjir di Desa Sungai Langsat. Dampak banjir dioperasionalkan berdasarkan indikator dari UNDRR (2020), seperti kerusakan infrastruktur,

terganggunya aktivitas masyarakat, munculnya kerugian ekonomi, dan dampak sosial seperti kesehatan dan pengungsian. Definisi operasional ini penting agar penilaian terhadap efektivitas strategi pemerintah dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Dengan demikian, keseluruhan definisi operasional ini memastikan bahwa setiap konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki batasan yang jelas, terukur, serta berbasis pada teori dan referensi ilmiah yang relevan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.2 Operasional Variabel

Variabel	indikator	Sub Indikator	Ukuran
Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir	1. Perencanaan Penanggulangan Banjir	a. Penyusunan SOP dan rencana darurat b. Analisis daerah rawan banjir c. Penetapan anggaran penanggulangan	Ordinal
	2. Pelaksanaan Tindakan	a. Evakuasi warga terdampak b. Pembangunan infrastruktur penahan banjir (tanggul, drainase) c. Sosialisasi dan edukasi mitigasi banjir	Ordinal
	3. Monitoring dan Evaluasi	a. Pemantauan daerah terdampak secara rutin b. Evaluasi efektivitas program c. Laporan dan perbaikan strategi ke depannya	Ordinal
	4. Kolaborasi dan Partisipasi	a. Kerjasama dengan masyarakat b. Koordinasi dengan instansi terkait (BPBD, TNI/Polri) c. Keterlibatan LSM atau komunitas lokal	Ordinal

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sungai Langsat.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan mendalam, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah. Artinya, penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada makna dan proses yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan suatu fenomena sosial berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan tanpa adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk:

1. Menggambarkan secara sistematis bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangani banjir di Desa Sungai Langsat.
2. Menganalisis langkah-langkah kebijakan yang diterapkan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

3. Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanggulangan banjir dari perspektif administrasi publik.

Pemilihan jenis penelitian ini dianggap tepat karena permasalahan banjir merupakan isu sosial dan kebijakan publik yang kompleks, melibatkan banyak aktor, serta memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan di tingkat lokal.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dijalankan, serta sejauh mana efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

3.2. Informan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti pihak yang dianggap paling tahu tentang objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sungai Langsat. Informan terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat yang terdampak banjir.

Adapun informan penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Desa Sungai Langsat)

no	Informan	Jumlah orang	Persentase
1.	Kepala BPBD Kabupaten Kuantan Singingi	1	10%
2.	Kepala Desa Sungai Langsat	1	10%
3.	Perangkat Desa dan aparatur	1	20%
4.	Tokoh Masyarakat	2	60%
Jumlah		5	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

Melalui informan-informan tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sungai Langsat.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan yang terlibat dalam penanggulangan banjir, seperti Kepala BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa Sungai Langsat, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak banjir.
2. Observasi langsung di lapangan, untuk melihat secara nyata pelaksanaan strategi penanggulangan banjir serta kondisi lingkungan di Desa Sungai Langsat.
3. Dokumentasi, berupa foto, catatan kegiatan, serta arsip terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di lokasi penelitian.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi aktual dan kontekstual mengenai bagaimana implementasi kebijakan dan strategi pemerintah dijalankan dalam upaya menanggulangi banjir di daerah tersebut.

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya dan mendukung analisis penelitian. Menurut Nazir (2014), data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

1. Dokumen resmi dari BPBD Kabupaten Kuantan Singingi terkait laporan kegiatan penanggulangan banjir.
2. Data dan arsip dari Kantor Desa Sungai Langsat, seperti laporan tahunan, peta wilayah, dan data jumlah penduduk terdampak banjir.

3. Literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta artikel yang relevan dengan topik administrasi negara dan kebijakan penanggulangan bencana.
4. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan daerah yang mendukung kebijakan penanggulangan bencana.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan di lapangan serta memberikan dasar teoritis dalam menganalisis strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan batasan yang jelas agar penelitian tidak melebar dan tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini difokuskan pada strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat).

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan Strategi Penanggulangan Banjir

   Meneliti bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan perencanaan dalam menghadapi bencana banjir, termasuk penyusunan program, pembagian tugas antarinstansi, serta perencanaan sumber daya yang digunakan.
2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir

   Mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan di lapangan, baik pada tahap mitigasi, tanggap darurat, maupun pasca bencana, serta

efektivitas pelaksanaannya terhadap penanganan banjir di Desa Sungai Langsat.

3. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

   Menganalisis sejauh mana koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, instansi terkait, dan lembaga lain berjalan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir.

4. Peran dan Partisipasi Masyarakat

   Menggali sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam kegiatan pencegahan, penanganan, maupun pemulihan pasca banjir.

5. Hambatan dan Faktor Pendukung

   Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala serta hal-hal yang mendukung keberhasilan strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir dijalankan, serta sejauh mana efektivitas kebijakan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak bencana tersebut.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena Desa Sungai Langsat merupakan salah satu wilayah yang

paling sering terdampak banjir setiap tahunnya, terutama saat musim hujan. Banjir di wilayah ini umumnya terjadi akibat meluapnya Sungai Kuantan yang melintasi desa tersebut.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci seperti aparatur pemerintah desa, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi, serta masyarakat yang terdampak banjir di Desa Sungai Langsat. Wawancara ini dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai strategi, kebijakan, dan langkah-langkah penanggulangan banjir yang telah diterapkan pemerintah, serta tanggapan masyarakat terhadap upaya tersebut.

3.6.2 Obserevasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan, seperti lokasi banjir tahunan, jembatan yang rusak akibat banjir, dan kawasan perkebunan sawit di sekitar daerah aliran sungai. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara nyata dampak banjir terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, serta bentuk penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah setempat.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan kegiatan BPBD, dokumen kebijakan pemerintah daerah, arsip desa, serta foto-foto kondisi banjir di Desa Sungai Langsat. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian.

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan makna dan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir di Desa Sungai Langsat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, peran masyarakat, serta kendala di lapangan. Data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian akan disisihkan agar analisis lebih fokus dan terarah.

3.7.2 Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antar data dan memudahkan peneliti dalam melihat pola, tema, serta kecenderungan yang muncul terkait dengan strategi penanggulangan banjir oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Desa Sungai Langsat.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama analisis data berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan interpretasi dari data yang telah disajikan dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan serta teori administrasi negara yang menjadi landasan penelitian. Hasil kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi pemerintah dalam menanggulangi banjir di Desa Sungai Langsat, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sungai Langsat)

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x	x	x												
4	Seminar Proposal									x															
5	Revisi Proposal										x														
6	Pembuatan Skripsi											x	x	x											
7	Bimbingan Skripsi														x	x	x	x							
8	Bidang Skripsi																		x	x					
9	Revisi Skripsi																				x	x			

Sumber :Modifikasi Penelitian 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Sejarah Desa Sungai Langsat

Desa Sungai Langsat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Secara umum, desa ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana banjir yang cukup tinggi, dimana kejadian banjir terjadi hampir setiap tahun, terutama pada saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

Secara historis, perkembangan Desa Sungai Langsat tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis wilayahnya yang berada pada kawasan aliran sungai. Keberadaan sungai memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola permukiman, aktivitas ekonomi, serta dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu sungai yang memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi desa adalah Sungai Teso.

Sungai Teso merupakan salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan berasal dari daerah hulu di Kecamatan Singingi. Aliran sungai ini bergerak dari wilayah hulu menuju wilayah hilir, melewati beberapa kawasan hingga akhirnya mempengaruhi wilayah Desa Sungai Langsat. Posisi geografis Desa Sungai Langsat yang berada pada bagian hilir menyebabkan desa ini menerima akumulasi aliran air dari wilayah hulu, sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir, terutama ketika terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan yang tinggi (Latifa, 2023:4).

Selain itu, secara hidrologis Sungai Teso merupakan bagian dari sistem aliran sungai yang lebih luas di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Batang Kuantan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika aliran air yang terjadi di Desa Sungai Langsat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah hulu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi di wilayah hulu, seperti peningkatan curah hujan atau perubahan penggunaan lahan, akan berdampak pada kondisi wilayah hilir, termasuk Desa Sungai Langsat.

Pada tahap awal perkembangan, masyarakat Desa Sungai Langsat memanfaatkan wilayah sekitar aliran sungai sebagai sumber utama kehidupan. Kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi sektor dominan yang berkembang karena didukung oleh ketersediaan air dan kondisi tanah yang relatif subur. Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga ketika terjadi gangguan seperti banjir, maka akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan waktu, terjadi perubahan kondisi lingkungan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut antara lain berupa peningkatan curah hujan, perubahan penggunaan lahan, serta berkurangnya daya resap tanah akibat aktivitas manusia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya aliran permukaan (runoff) yang masuk ke dalam sungai, sehingga meningkatkan debit air dan memperbesar potensi terjadinya banjir (Putra, 2020:67).

Selain itu, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi juga menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung air. Pendangkalan sungai mengakibatkan air

lebih mudah meluap ke wilayah permukiman masyarakat, terutama pada saat debit air meningkat. Sistem drainase yang belum optimal juga menjadi faktor tambahan yang memperparah kondisi genangan air di wilayah Desa Sungai Langsat.

Dalam perkembangannya, banjir di Desa Sungai Langsat tidak lagi bersifat musiman semata, tetapi telah menjadi permasalahan yang berulang dengan intensitas yang cenderung meningkat. Banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, serta infrastruktur masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan sejarah Desa Sungai Langsat menunjukkan bahwa perkembangan wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Teso yang berasal dari wilayah hulu di Kecamatan Singingi serta keterkaitannya dengan sistem aliran sungai yang lebih luas. Posisi desa sebagai wilayah hilir menyebabkan tingginya kerentanan terhadap banjir akibat akumulasi aliran air dari wilayah hulu serta perubahan kondisi lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu.

4.2 Kondisi Geografis

Desa Sungai Langsat secara administratif berada di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Secara geografis, wilayah ini termasuk dalam kawasan dataran rendah dengan kondisi topografi yang relatif datar hingga landai. Karakteristik topografi tersebut menyebabkan pergerakan air di permukaan tanah cenderung lambat, sehingga meningkatkan potensi terjadinya

genangan air, terutama pada wilayah yang memiliki sistem drainase yang kurang optimal.

Kondisi topografi yang datar juga menyebabkan rendahnya kemampuan aliran air untuk segera mengalir ke saluran utama, sehingga air hujan yang turun dalam jumlah besar akan tertahan lebih lama di permukaan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan wilayah Desa Sungai Langsat rentan terhadap banjir, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

Selain faktor topografi, letak geografis Desa Sungai Langsat yang berada pada wilayah hilir turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kerentanan banjir. Sebagai daerah hilir, desa ini menerima aliran air dari wilayah hulu yang berada di atasnya, sehingga volume air yang masuk ke wilayah ini merupakan hasil akumulasi dari beberapa daerah sekaligus. Kondisi ini menyebabkan peningkatan debit air yang signifikan, terutama pada saat musim hujan, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya luapan air ke wilayah permukiman.

Secara hidrologis, Desa Sungai Langsat dipengaruhi oleh aliran Sungai Teso yang merupakan salah satu bagian dari sistem aliran sungai di Kabupaten Kuantan Singingi. Sungai Teso berfungsi sebagai saluran utama yang mengalirkan air dari wilayah hulu menuju hilir. Aliran ini membawa air dari berbagai wilayah yang berada di bagian atas, sehingga kondisi debit air di sungai sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi lingkungan di wilayah hulu. Ketika terjadi peningkatan debit air yang melebihi kapasitas tampung sungai, maka air

akan meluap ke wilayah sekitarnya, termasuk ke permukiman masyarakat di Desa Sungai Langsat.

Lebih lanjut, kondisi hidrologi di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh aliran Sungai Teso, tetapi juga oleh interaksi antara aliran sungai, curah hujan, serta kondisi permukaan tanah. Intensitas curah hujan yang tinggi dalam periode tertentu dapat menyebabkan peningkatan volume air secara cepat, sementara kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi faktor penentu dalam mengurangi risiko genangan. Apabila kemampuan infiltrasi tanah rendah, maka sebagian besar air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan (runoff) yang masuk ke dalam sungai.

Selain itu, kondisi lingkungan seperti penggunaan lahan dan tutupan vegetasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan tanah dalam menyerap air. Berkurangnya vegetasi akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, menyebabkan menurunnya daya resap tanah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan yang langsung masuk ke sungai, sehingga mempercepat peningkatan debit air dan meningkatkan risiko banjir.

Di sisi lain, kondisi sistem drainase yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor yang memperparah terjadinya genangan air di wilayah Desa Sungai Langsat. Saluran drainase yang tidak mampu mengalirkan air dengan baik akan menyebabkan air tertahan di permukaan, sehingga memperluas area genangan dan memperpanjang durasi banjir. Hal ini menunjukkan bahwa selain

faktor alam, faktor teknis seperti infrastruktur juga turut berperan dalam menentukan tingkat kerentanan wilayah terhadap banjir.

Dengan demikian, kondisi geografis Desa Sungai Langsat yang meliputi topografi dataran rendah, posisi sebagai wilayah hilir, serta pengaruh aliran Sungai Teso sebagai bagian dari sistem hidrologi, menjadikan desa ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir. Interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia semakin memperkuat potensi risiko tersebut, sehingga diperlukan upaya pengelolaan lingkungan dan penataan wilayah yang lebih baik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

4.3 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Desa Sungai Langsat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Ketergantungan terhadap sektor ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kehidupan masyarakat dengan kondisi lingkungan, terutama terkait dengan ketersediaan air, kesuburan tanah, serta kondisi iklim yang mempengaruhi hasil produksi.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sebagian kecil masyarakat juga bekerja pada sektor informal lainnya, seperti perdagangan kecil dan jasa. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan, terutama ketika terjadi bencana banjir yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Sungai Langsat dari waktu ke waktu turut mempengaruhi kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun untuk kegiatan ekonomi. Peningkatan kebutuhan lahan ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan, seperti pembukaan lahan baru untuk permukiman dan perkebunan. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan aliran permukaan (runoff) yang dapat memperbesar risiko terjadinya banjir (Putra, 2020:67).

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan lahan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan degradasi lingkungan, seperti berkurangnya tutupan vegetasi dan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap air. Kondisi ini semakin memperparah potensi terjadinya banjir di wilayah Desa Sungai Langsat.

Dari sisi sosial, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Adaptasi tersebut tidak hanya berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir, tetapi juga mencakup pola hidup dan strategi bertahan dalam kondisi yang rentan terhadap bencana. Misalnya, masyarakat cenderung menyesuaikan aktivitas ekonomi dan sosial mereka berdasarkan kondisi cuaca dan potensi banjir yang terjadi.

Selain itu, pengalaman masyarakat dalam menghadapi banjir yang terjadi secara berulang juga membentuk pola perilaku kolektif dalam mengurangi risiko bencana. Namun demikian, kemampuan adaptasi masyarakat memiliki keterbatasan, terutama jika intensitas dan frekuensi banjir terus meningkat. Oleh

karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program penanggulangan bencana yang lebih terstruktur (Jupersatek, 2021:40).

Dengan demikian, kondisi demografis Desa Sungai Langsat menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara jumlah penduduk, mata pencaharian, serta kondisi lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan menjadi faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya risiko banjir, sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi, masyarakat Desa Sungai Langsat memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama mata pencaharian. Aktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama ketersediaan air, kondisi tanah, serta faktor cuaca. Oleh karena itu, perubahan kondisi lingkungan seperti terjadinya banjir memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat (Latifa, 2023:5).

Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan utama ekonomi masyarakat menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Ketika banjir terjadi, lahan pertanian sering mengalami kerusakan, seperti terendamnya tanaman dalam jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan gagal panen. Selain itu, kualitas tanah juga dapat menurun akibat

genangan air yang terlalu lama, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas lahan pada musim berikutnya.

Banjir yang terjadi secara berulang juga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Proses distribusi hasil pertanian menjadi terhambat akibat akses jalan yang terendam atau rusak, sehingga menyulitkan masyarakat dalam menjual hasil produksi mereka. Hal ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan melemahnya kondisi ekonomi rumah tangga (Jupersatek, 2021:40).

Selain berdampak pada sektor pertanian, banjir juga memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan dan jasa. Aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat karena terbatasnya mobilitas serta terganggunya akses terhadap fasilitas umum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di wilayah Desa Sungai Langsat.

Dari sisi infrastruktur, banjir juga menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, seperti jalan desa, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Infrastruktur yang rusak memerlukan waktu dan biaya untuk perbaikan, sehingga memperlambat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca banjir.

Dari aspek sosial, masyarakat Desa Sungai Langsat telah memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi secara berulang. Pengalaman ini membentuk pola perilaku dan kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi banjir, seperti meningkatkan kewaspadaan saat musim hujan dan melakukan upaya-upaya sederhana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, kemampuan adaptasi masyarakat memiliki keterbatasan, terutama ketika intensitas dan frekuensi banjir semakin meningkat.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam melakukan upaya mitigasi maupun pemulihan pasca bencana. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan menghadapi dan mengatasi dampak banjir di antara masyarakat.

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi Desa Sungai Langsat menunjukkan bahwa banjir memiliki dampak yang luas dan kompleks, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan banjir yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berkelanjutan

4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Desa Sungai Langsat meliputi berbagai infrastruktur dasar yang berperan penting dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jaringan jalan desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sistem drainase yang berfungsi dalam pengelolaan aliran air di wilayah permukiman.

Keberadaan sarana dan prasarana ini pada kondisi normal dapat menunjang aktivitas masyarakat dengan baik, terutama dalam mendukung mobilitas, kegiatan ekonomi, serta akses terhadap layanan publik. Jalan desa menjadi jalur utama yang menghubungkan antar wilayah, baik di dalam desa maupun dengan desa lain di sekitarnya. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana di Desa Sungai Langsat sangat dipengaruhi oleh kejadian banjir yang terjadi secara berulang. Pada saat banjir, sebagian infrastruktur mengalami gangguan yang cukup signifikan. Jalan desa seringkali tergenang air, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi sulit dilalui. Hal ini menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat, baik dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, maupun dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga dapat terdampak oleh banjir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Genangan air dapat menghambat aktivitas belajar mengajar serta pelayanan kesehatan, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem drainase yang ada di Desa Sungai Langsat memiliki peran yang sangat penting dalam mengalirkan air, terutama pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Namun, kapasitas drainase yang belum memadai seringkali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya genangan air. Saluran drainase yang

tidak mampu menampung debit air yang besar menyebabkan air meluap ke permukaan, sehingga memperparah kondisi banjir.

Selain kapasitas yang terbatas, kondisi drainase juga dapat dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan yang kurang optimal. Saluran yang tersumbat oleh sedimentasi atau sampah dapat menghambat aliran air, sehingga meningkatkan risiko genangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sarana drainase menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengurangi dampak banjir.

Di sisi lain, kondisi sarana dan prasarana yang terdampak banjir juga memerlukan upaya perbaikan yang tidak sedikit, baik dari segi waktu maupun biaya. Kerusakan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dapat memperlambat proses pemulihan pasca banjir, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan demikian, kondisi sarana dan prasarana di Desa Sungai Langsat memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kerentanan terhadap banjir. Infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai, khususnya pada sistem drainase dan akses jalan, menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak banjir yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas, kapasitas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan guna mendukung efektivitas penanggulangan bencana banjir di wilayah tersebut.

4.6 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu wilayah karena menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Keberadaan penduduk tidak hanya berkaitan dengan jumlah masyarakat yang tinggal di suatu desa, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, data mengenai jumlah penduduk menjadi salah satu data penting yang harus dimiliki oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Sungai Langsat merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat dengan kehidupan sosial yang masih cukup erat dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Masyarakat desa hidup berdampingan dengan hubungan sosial yang harmonis serta masih mempertahankan budaya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pembangunan desa, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Jumlah penduduk di Desa Sungai Langsat terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan yang tersebar di beberapa wilayah pemukiman masyarakat. Sebagian besar masyarakat menetap secara turun-temurun di desa tersebut sehingga hubungan antar masyarakat masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat pendatang yang menetap karena faktor pekerjaan, perkawinan, maupun alasan ekonomi lainnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Perkembangan jumlah penduduk di Desa Sungai Langsat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kelahiran, tingkat kematian, perpindahan

penduduk, serta kondisi ekonomi masyarakat. Tingkat kelahiran yang cukup stabil dan adanya perpindahan penduduk dari daerah lain dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk desa. Sebaliknya, perpindahan masyarakat ke daerah perkotaan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan juga dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk di desa.

Jumlah penduduk yang terus mengalami perubahan tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin meningkat. Kebutuhan tersebut meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, sarana air bersih, fasilitas ibadah, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penduduk usia produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa karena menjadi tenaga kerja utama dalam berbagai sektor pekerjaan. Mayoritas masyarakat Desa Sungai Langsat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Di samping itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, buruh harian, pegawai swasta, serta pekerjaan lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi jumlah penduduk yang ada di Desa Sungai Langsat juga menjadi salah satu indikator dalam melihat potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif, maka semakin besar pula

peluang desa untuk berkembang apabila didukung dengan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat yang baik. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, data jumlah penduduk sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Data kependudukan digunakan dalam proses pendataan bantuan sosial, penyusunan program pembangunan, pelayanan surat-menyurat, pendataan pemilih dalam pemilihan umum, serta berbagai kegiatan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah desa secara rutin melakukan pendataan dan pembaruan data penduduk agar informasi yang dimiliki tetap akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Pemerintah Desa Sungai Langsat juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui tertib administrasi kependudukan. Pendataan penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat desa. Dengan adanya data kependudukan yang baik, maka pemerintah desa dapat lebih mudah dalam menentukan kebijakan maupun program pembangunan yang tepat sasaran.

Selain menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan, jumlah penduduk juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana desa. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula

kebutuhan terhadap fasilitas umum yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu memperhatikan kondisi jumlah penduduk dalam merencanakan pembangunan agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Secara umum, kondisi masyarakat Desa Sungai Langsat masih memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama masyarakat. Kehidupan masyarakat yang harmonis serta adanya kerja sama dalam berbagai kegiatan menjadi salah satu kekuatan sosial yang dimiliki desa. Nilai kebersamaan dan gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan pembangunan, kegiatan keagamaan, kegiatan adat, maupun kegiatan sosial lainnya.

Dengan adanya jumlah penduduk yang cukup besar, maka pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, data kependudukan yang akurat juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan desa agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Sungai Langsat.

4.7 Rumah Ibadah Desa Sungai Langsat

Rumah ibadah merupakan salah satu fasilitas umum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Sungai Langsat. Selain digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, rumah ibadah juga menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Sungai Langsat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, serta budaya gotong royong. Oleh karena itu,

keberadaan rumah ibadah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat desa.

Keberadaan rumah ibadah di Desa Sungai Langsat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan karakter dan kehidupan sosial masyarakat. Rumah ibadah tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah lainnya, tetapi juga digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan di rumah ibadah antara lain pengajian rutin, ceramah agama, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan remaja masjid, musyawarah masyarakat, kegiatan yasinan, hingga kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak dan remaja.

Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Langsat memeluk agama Islam sehingga rumah ibadah yang paling banyak ditemukan di desa ini adalah masjid dan mushalla. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan utama masyarakat desa, terutama untuk pelaksanaan salat berjamaah lima waktu, salat Jumat, salat Idulfitri dan Iduladha, serta kegiatan keagamaan lainnya. Pada bulan Ramadan, aktivitas di masjid biasanya meningkat karena digunakan untuk kegiatan buka puasa bersama, salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Selain masjid, mushalla juga memiliki peranan yang cukup penting bagi masyarakat Desa Sungai Langsat. Mushalla biasanya berada di lingkungan pemukiman warga sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah tanpa harus pergi jauh ke masjid utama desa. Mushalla juga sering digunakan sebagai tempat pendidikan agama bagi anak-anak seperti belajar membaca Al-

Qur’an, pelaksanaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), serta kegiatan pengajian ibu-ibu dan remaja di lingkungan sekitar.

Keberadaan rumah ibadah yang tersebar di beberapa wilayah desa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan sehari-hari. Dengan adanya fasilitas rumah ibadah yang mudah dijangkau, masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan tertib. Selain itu, rumah ibadah juga menjadi tempat untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat karena berbagai kegiatan yang dilakukan biasanya melibatkan partisipasi warga secara bersama-sama.

Dalam menjaga kondisi rumah ibadah, masyarakat Desa Sungai Langsat masih mempertahankan budaya gotong royong. Kegiatan membersihkan lingkungan rumah ibadah, memperbaiki fasilitas yang rusak, hingga pembangunan rumah ibadah dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Dana pembangunan dan perawatan rumah ibadah biasanya berasal dari sumbangan masyarakat, donatur, maupun hasil swadaya warga desa. Hal tersebut menunjukkan tingginya rasa kepedulian masyarakat terhadap fasilitas keagamaan yang ada di desa.

Kondisi rumah ibadah di Desa Sungai Langsat pada umumnya sudah cukup baik dan layak digunakan. Sebagian rumah ibadah telah memiliki fasilitas pendukung seperti tempat wudhu, pengeras suara, kipas angin, kamar mandi, dan area parkir sederhana. Walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan, namun secara keseluruhan rumah ibadah yang

ada masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

Rumah ibadah juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat desa. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, masyarakat menjadi lebih sering berinteraksi dan menjalin hubungan sosial yang baik antar sesama warga. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati juga terus terjaga melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan rumah ibadah.

Selain menjadi tempat ibadah dan kegiatan sosial, rumah ibadah di Desa Sungai Langsat juga sering dijadikan sebagai tempat penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada beberapa kesempatan, pemerintah desa maupun tokoh masyarakat memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan desa, program pembangunan, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, rumah ibadah memiliki fungsi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat Desa Sungai Langsat.

Adapun jumlah rumah ibadah yang terdapat di Desa Sungai Langsat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Rumah Ibadah Desa Sungai Langsat

No.	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	12
3.	Gereja	0
	Total	15

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rumah ibadah di Desa Sungai Langsat didominasi oleh masjid dan mushalla. Hal tersebut disebabkan

karena mayoritas penduduk Desa Sungai Langsat memeluk agama Islam. Jumlah rumah ibadah yang tersedia dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sehari-hari.

Dengan adanya rumah ibadah yang memadai, masyarakat Desa Sungai Langsat diharapkan dapat terus meningkatkan nilai-nilai keagamaan, memperkuat hubungan sosial antarwarga, serta menjaga persatuan dan keharmonisan di lingkungan desa. Rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Desa Sungai Langsat.

4.8 Fasilitas Umum Desa Sungai Langsat

Fasilitas umum merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Keberadaan fasilitas umum yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperlancar berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Desa Sungai Langsat, fasilitas umum memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Pembangunan fasilitas umum di Desa Sungai Langsat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah desa. Beberapa fasilitas umum yang tersedia di desa ini meliputi fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, olahraga, infrastruktur desa, serta sarana ekonomi masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendukung proses pembangunan desa.

Secara umum, kondisi fasilitas umum di Desa Sungai Langsat sudah cukup memadai walaupun masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya menjaga dan memelihara fasilitas yang ada agar dapat digunakan dengan baik dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kondisi fasilitas umum di lingkungan desa.

4.8.1 Fasilitas Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung jalannya kegiatan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat desa. Keberadaan fasilitas pemerintahan sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pelayanan publik, kegiatan administrasi desa, serta pelaksanaan pembangunan desa.

Di Desa Sungai Langsat terdapat beberapa fasilitas pemerintahan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan desa. Kantor desa menjadi pusat pelayanan administrasi masyarakat seperti pengurusan surat menyurat, data kependudukan, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Selain itu, terdapat juga balai desa yang sering digunakan untuk kegiatan musyawarah dan pertemuan masyarakat.

Tabel 4.2 Fasilitas Pemerintahan Desa Sungai Langsat

No	Fasilitas Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor kepala desa	1
2	Pos kamling	5
3	BUMDes	1
4	Balai Desa	1
	Total	8

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

4.8.2 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan sarana penting dalam mendukung proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Sungai Langsat. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan masyarakat sehingga keberadaan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Di Desa Sungai Langsat terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang digunakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan usia dini. Selain sekolah formal, terdapat juga tempat pendidikan nonformal seperti TPA yang digunakan untuk pendidikan agama bagi anak-anak.

Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan Desa Sungai Langsat

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	Paud	2
2	Sekolah Dasar	3
3	SLTA	-
4	MDA/TPA	3
	Total	7

Sumber: Data Olahan Peneliti 2026.

4.8.3 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa. Keberadaan fasilitas kesehatan

sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membantu penanganan masalah kesehatan di lingkungan desa.

Di Desa Sungai Langsat terdapat beberapa fasilitas kesehatan sederhana yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, kegiatan posyandu juga rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan Desa Sungai Langsat

No.	Faskes Desa Sungai Langsat	Jumlah
1	Posyandu	3
2	Puskesdes	2
3	Apotik	4
	Jumlah	9

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

4.8.4 Fasilitas Olahraga Desa Sungai Langsat

Fasilitas olahraga digunakan masyarakat untuk kegiatan olahraga dan aktivitas kepemudaan. Keberadaan fasilitas olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadi sarana hiburan dan mempererat hubungan sosial antarwarga.

Di Desa Sungai Langsat terdapat beberapa fasilitas olahraga sederhana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan olahraga sehari-hari.

Tabel 4.5 Fasilitas Olahraga Desa Sungai Langsat

No.	Jenis fasilitas Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Voli	6
2.	Lapangan Sepak Bola	1
3.	Lapangan Umum	1
	Total	8

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026.

4.8.5 Infrastruktur Desa

Infrastruktur desa merupakan sarana penunjang yang berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat serta memperlancar akses dan mobilitas warga desa. Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menanggulangi Banjir di Desa Sungai Langsat, kondisi infrastruktur desa menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi upaya penanggulangan banjir. Infrastruktur seperti jalan desa, drainase, jembatan, tanggul, serta saluran air memiliki peran dalam mengurangi risiko terjadinya genangan dan memperlancar aliran air saat musim hujan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga mendukung pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam penanganan banjir, baik melalui pembangunan fisik, perbaikan saluran drainase, maupun peningkatan akses evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur di Desa Sungai Langsat perlu diperhatikan karena berhubungan langsung dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat desa.

Infrastruktur di Desa Sungai Langsat meliputi jalan desa, jembatan, drainase, dan fasilitas penerangan jalan.

Tabel 4.6 Infrastruktur Desa Sungai Langsat

No	Jenis Infrastruktur	Kondisi
1.	Jalan Desa	Baik
2.	Jembatan	Buruk
3.	drainase	Baik
4.	Penerangan jalan	Baik

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

4.8.6 Sarana Ekonomi Masyarakat

Sarana ekonomi masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat desa. Keberadaan sarana ekonomi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Desa Sungai Langsat terdapat beberapa sarana ekonomi yang dimanfaatkan masyarakat seperti warung, kios, dan pasar kecil.

Tabel 4.7 Sarana Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Langsat

No.	Jenis Sarana Ekonomi	Jumlah
1.	Pasar Kecil	1
2.	Warung/Kedai	46
	Total	47

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Desa Sungai Langsat telah memiliki berbagai fasilitas umum yang cukup mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan, namun secara umum fasilitas umum yang tersedia sudah cukup membantu masyarakat dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ibadah, olahraga, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya fasilitas umum yang memadai, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Langsat dapat terus meningkat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulanan Bencana Banjir Di Kabupaten Kuantan singingi (Studi Kasus Di Desa Sungai Langsat) sudah cukup efektif, yang mana strategi pemerintah sudah cukup efektif ditengah keterbatasan / efisiensi anggaran untuk penanggulangan bencana, tentu tidak bisa hanya desa saja, perlu kerja sama antar banyak pihak, karena pemerintahan desa sangat terbatas dalam segi anggaran, fasilitas maupun tenaga kerja untuk penanggulangan banjir ini, untuk itu pihak kecamatan dan kabupaten melakukan mediasi berkoordinasi pihak perusahaan untuk penanggulangan banjir ini, sehingga dihasilkan kesepakatan bersama antara perusahaan yang beroperasi dan melintasi ruas jalan ini. yang mana pada waktu itu Kesepakatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuansing H Muklisin yang dihadiri oleh para perwakilan perusahaan dan badan usaha.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas di ajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak perusahaan dan beberapa badan usaha melaksanakan dan menjalan apa yang telah di sepakati bersama.
2. Diharapkan membuat portal dijalan jika perusahaan dan beberapa badan usaha tidak menjalankan komitemen untuk melakukan perawatan.
3. Diharapkan pihak terkait saling bersinergi dalam melaksanakan/ menjalankan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A., Widianingsih, I., Buchari, R. A., & Nurasa, H. (2025). Resilience governance: A concepts analysis and research synthesis. *Discover Environment*, 3(50).

Agrawal, A., & Gupta, K. (2005). Decentralization and participation: The governance of common pool resources in Nepal. *World Development*, 33(7), 1101–1114.

Ansell, C., & Gash, A. (2022). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Babay, S. S., Tungka, A. E., & Moniaga, I. L. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir. *Fraktal*, 1(1), 9–16.

Benson, C., Twigg, J., & Rossetto, T. (2019). *Disaster risk reduction: Cases from urban areas*. Routledge.

Berkes, F. (2021). *Advanced introduction to community-based conservation*. Edward Elgar Publishing.

Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process* (5th ed.). Routledge.

Bovaird, T., & Löffler, E. (2020). *Public management and governance* (4th ed.). Routledge.

BNPB. (2023). *Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023*. BNPB.

BNPB. (2023). *Laporan kinerja penanggulangan bencana nasional*. BNPB.

BNPB. (2024). *Indeks resiliensi daerah*. BNPB.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.

Cairney, P. (2023). *Understanding public policy: Theories and issues* (3rd ed.). Red Globe Press.

Coppola, D. P. (2020). *Introduction to international disaster management* (4th ed.). Butterworth-Heinemann.

CRED. (2022). *Disaster risk profile: Global trends*.

Crosby, B. C., ‘t Hart, P., & Torfing, J. (2022). *Public value and collaborative governance*. Oxford University Press.

David, F. R., & David, F. R. (2021). *Strategic management: Concepts and cases* (17th ed.). Pearson.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2020). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.

Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. *Business Research*, 13, 215–246.

Dunn, W. N. (2020). *Public policy analysis* (7th ed.). Routledge.

Dye, T. R. (2020). *Understanding public policy* (16th ed.). Pearson.

Fauziyah, U., & Kriswibowo, A. (2023). Community-based mitigation dalam pengurangan risiko banjir. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 10(1), 1–12.

FEMA. (2020). *Emergency preparedness guide*.

Gaillard, J. C., & Gomez, C. (2023). *People-centred disaster risk reduction*. Routledge.

Haddow, G., Bullock, J., & Coppola, D. (2020). *Introduction to emergency management* (7th ed.). Elsevier.

Hapsa, H., Putra, F., & Baidawi, A. (2022). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 464–473.

Head, B. W. (2021). *Evidence-based policymaking: Principles and practice*. Cambridge University Press.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2020). *Strategic management* (13th ed.). Cengage.

IFRC. (2021). *Community-based disaster risk reduction guidelines*.

IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.

IPCC. (2023). *Climate change 2023: Impacts, adaptation, and vulnerability*.

Istiqomah, Y. (2023). Pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan banjir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 92–106.

Jaques, T., & Lewis, M. (2024). Strategic agility in public sector crisis management. *Public Management Review*.

Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile governance in crisis response. *Government Information Quarterly*, 37(3).

Jilke, S., Van Ryzin, G., & Marvel, J. (2022). *Understanding street-level bureaucracy*. Cambridge University Press.

Kelman, I. (2020). *Disaster by choice*. Oxford University Press.

Kettunen, P., & Kallio, J. (2021). Digital transformation of local governments. *Local Government Studies*, 47(6), 867–886.

Kurniawan, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. *Jurnal* Manajemen Bencana, 4(2), 55–70.

Liu, C.-F., & Mostafavi, A. (2025). Network dynamics of community resilience. *Preprint*.

Makhfud, & Mursyidah, L. (2024). Community participation in flood disaster management. *IJLER*, 19(4).

Maulita, R., et al. (2023). Mitigasi banjir rob dan kapabilitas sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 4(2), 178–200.

Maynard-Moody, S., & Portillo, S. (2021). *Street-level bureaucracy re-examined*. Cambridge University Press.

Mechler, R., et al. (2020). *Loss and damage from climate change*. Springer.

Mintzberg, H. (2021). *The rise and fall of strategic planning*. Free Press.

OECD. (2021). *Disaster risk governance framework*. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (2020). *Public service logic*. Routledge.

Osborne, S. P. (2022). Public service logic and co-creation of value. *Public Management Review*.

Partarini, N. M. C., & Wirastri, M. V. (2023). Nature-based solution dalam mitigasi banjir. *Jurnal Atma Inovasia*, 4(2).

Paton, D., & Johnston, D. (2021). *Disaster resilience: An integrated approach* (2nd ed.). Charles C Thomas.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone*. Simon & Schuster.

Putri, H. R. D., & Sitaresmi, D. T. (2023). Edukasi mitigasi banjir melalui media. *JAMAS*, 1(3), 298–304.

Rahman, M., et al. (2022). Community preparedness for flood disaster. *IJDRR*, 79.

Shaw, R. (2020). *Community-based disaster risk reduction*. Elsevier.

Stoker, G. (2020). Public value management. *Public Administration Review*, 80(1), 1–12.

Tierney, K. (2021). *Disasters: A sociological approach*. Polity Press.

Twigg, J. (2022). *Disaster risk reduction: Good practice review*. ODI.

UNDP. (2023). *Strengthening local disaster risk governance*.

UNDRR. (2020). *Human cost of disasters*.

UNDRR. (2022). *Global assessment report on disaster risk reduction*.

UNDRR. (2023). *Global assessment report on disaster risk reduction*.

Wandik, H., et al. (2024). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir. *Jurnal MEDIAN*, 14(2), 79–89.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2021). *At risk* (2nd ed.). Routledge.

World Bank. (2023). *Building resilient infrastructure and communities*.

Wirtz, B. W., & Müller, W. (2022). *Digital government*. Springer.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara Bersama Ketua BPBD



Wawancara dengan Aparatur Desa dan Kades Muara Langsat

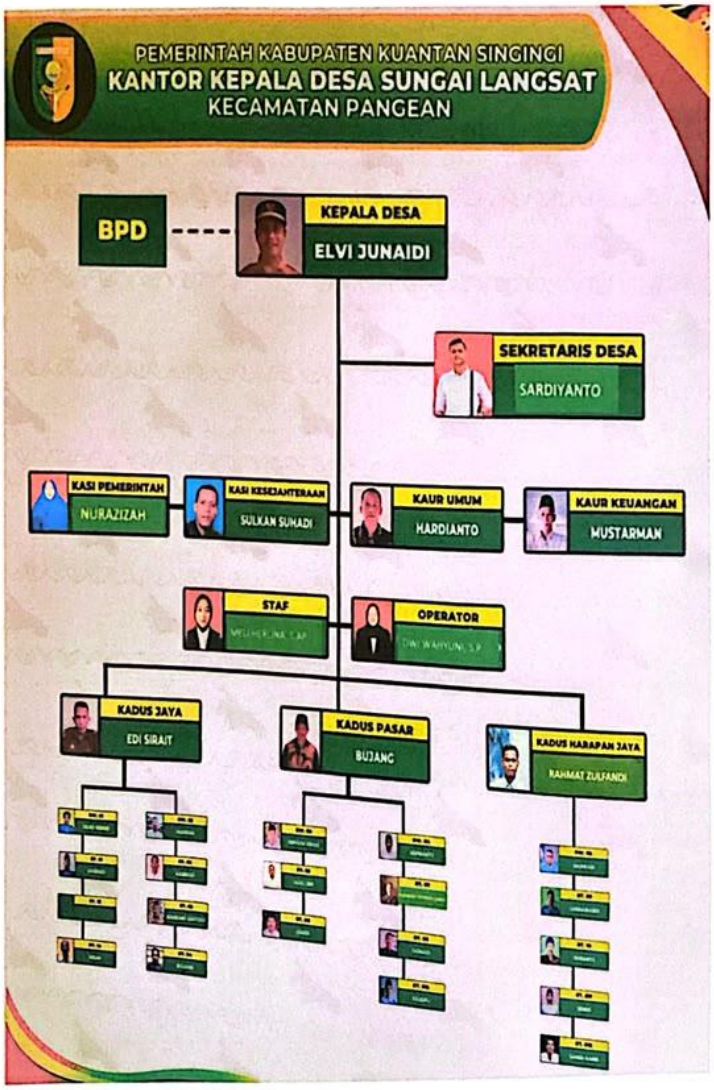
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT
KECAMATAN PANGEAN
BPD
KEPALA DESA
ELVI JUNAIDI
SEKRETARIS DESA
SARDIYANTO
KASI PEMERINTAH
NURAZIZAH
KASI KESEJAHTERAAN
SULKAN SUHADI
KAUR UMUM
HARDIANTO
KAUR KEUANGAN
MUSTARMAN
STAF
OPERATOR
KADUS JAYA
EDI SIRAIT
KADUS PASAR
BUJANG
KADUS HARAPAN JAYA
RAHMAT ZULFANDI









Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 09-/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnolo gi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Ahkhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
b. Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Lathifatus Sa'adah
NPM : 220411036
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Daerah dalam Penanggulan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat).

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT
KECAMATAN PANGEAN
JL.Jenderal Soedirman No.....

SURAT BALASAN PERMOHONAN WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini Atas Nama Kepala Desa Sungai Langsat dengan ini menerangkan bahwa kami telah kami telah menerima surat permohonan wawancara dari :

Nama	: **LATHIFATUS SA'ADAH**
NIM	: 220411036
Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: Teluk Kuantan
Judul Penelitian	: "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DIKABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk Melakukan Penelitian di :	1. BPD KUANTAN SINGINGI 2. KEPALA DESA DAN APARATUR SUNGAI LANGSAT 3. TOKOH MASYARAKAT

Sehubungan dengan hal tersebut PEMERINTAH DESA SUNGAI LANGSAT memberikan izin dan telah dilaksanakan wawancara untuk mendukung penelitian tersebut.

Demikian surat Balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIBUAT DI : SUNGAI LANGSAT
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2026
An KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT
SEKRETARIS DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPALA DESA SUNGAI LANGSAT
KECAMATAN PANGEAN

SARDIYANTO

PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JL. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LATHIFATUS SA'ADAH

NPM : 220411036

DOSEN PEMBIMBING : *Pembimbing 1. Rika Ramadhanti, S.Sos.,M.Si*

2. Sarjan M, S.Sos.,M.Si

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DESA SUNGAI LANGSAT)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	20 Juli 2026	Kalau perngarang lebih dari dua Tulis dkk			
2.	20 Juli 2026	Judul buku cetak miring			
3.	20 Juli 2026	Halaman dapus di bawah			
		Legasi dari BAB I			

		[illegible]			
	19/08-26	Perbaik. Analisi per Indikator.	RR.		
	18/08-26	S.3 Pembahasan	RR.		
	26/08-26	Acc & Ultimate	RR.		

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Lathifatus Sa'adah**

NPM : 220411036

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sungai Langsat).

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Sahri Muharam, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Lathifatus Sa'adah
Tempat/Tanggal Lahir	: Oku Timur/29 September 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Nikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Muara Langsat, Sentajo Raya
Alamat Email	: latifampa78@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2015 LULUS MIS Nurul Iman Kumpul Mulyo
	2. Tahun 2018 LULUS Mts Nurul Iman Banumas
	3. Tahun 2021 LULUS SMA Daruttaqwa Purwasari

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 06 Agustus 2026

Penulis

LATHIFATUS SA'ADAH

NPM.220411036